SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian tujuan/sasaran kinerja atas semua program dan kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja bagi pembangunan Kabupaten Belitung di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Januari 2026
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH

Marzuki, S.IP

Daftar isi

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

Daftar Gambar ..... **vi**

Ringkasan Eksekutif ..... **vii**

Bab 1 Pendahuluan **1-1**

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-2
B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-3
C. Aspek Strategis Organisasi 1-19
D. Sistematika Laporan 1-20

Bab 2 Perencanaan Kinerja **2-1**

A. Target Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Periode Renstra 2024-2026 dan Periode Renstra 2025-2029) 2-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Induk Periode Renstra 2024-2026 dan PK Perubahan Sesuai Periode Renstra 2025-2029) 2-8

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja **3-1**

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Periode Renstra 2024-2026 dan Periode Renstra 2025-2029 3-1
B. Kinerja Lainnya 2025 3-95
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025 3-98

Bab 4 Penutup **4-1**

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2025 4-1
B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026 4-3

Lampiran

a. Target, Realisasi dan Capaian sasaran Program/Kegiatan
b. Perbandingan Realisasi Sasaran Program/Sasaran Kegiatan
c. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Output Kegiatan (IOK)
d. Perbandingan Realisasi Indikator Ouput Kegiatan (IOK)
e. Jumlah Program Prioritas Yang Tercapai Sesuai Target
f. Jumlah Kegiatan Prioritas Yang Tercapai Sesuai Target
g. Jumlah Proyek Prioritas Strategis Yang Tercapai Sesuai Target
h. Jumlah Proyek Strategis Nasional Yang Tercapai Sesuai Target
i. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025
j. Perjanjian Kinerja Induk dan PerubahanTahun 2025

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Berdasarkan Pangkat/Golongan 1-3

Tabel 1.2 Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Berdasarkan Pendidikan 1-3

Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Prioritas dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-19

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 2-2

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 2-4

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum Dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2-5

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum..... 2-6

Tabel 2.5 Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat..... 2-6

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian Dan Pembangunan..... 2-7

Tabel 2.7 Sasaran dan Indikator RPD Terkait Perekonomian Dan Pembangunan..... 2-8

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 2-9

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 2-11

Tabel 3.1 Skala Nilai Kinerja 3-1

Tabel 3.2 Ringkasan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) 3-2

Tabel 3.3 Ringkasan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029) 3-3

Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Renstra Tahun 2024-2026 3-4

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan) 1 3-6

Tabel 3.6 Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 3-7

Tabel 3.7 Target dan Realiasasi Indikator RPD Terkait Bidang Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 3-7

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Indeks Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1 3-12

Tabel 3.9 Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum Tahun 2025 3-13

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum Tahun 2025 3-13

Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capain Program Bidang Adminsitrasi Umum Tahun Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 3-18

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 2 3-25

Tabel 3.13 Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 3-26

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 3-26

Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 3-31

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan) 2 3-35

Tabel 3.17 Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 3-36

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 3-36

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1 3-39

Tabel 3.20 Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 3-40

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 3-40

Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 3-46

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan) 3-49

Tabel 3.24 Realisasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 3-50

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1 3-53

Tabel 3.26 Realisasi Nilai Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif Tahun 2025 3-54

Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 3-61

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 2 3-65

Tabel 3.29 Realisasi Nilai Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif Tahun 2025 3-66

Tabel 3.30 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 3-76

Tabel 3.31 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 3 3-80

Tabel 3.32 Realisasi Nilai Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum Yang Efektif Tahun 2025 3-80

Tabel 3.33 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program Bidang Administrasi Umum Tahun 2025 3-88

Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 3-98

Tabel 3.35 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Jenis Belanja 3-99

Tabel 3.36 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Program/Kegiatan 3-99

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-4

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3-9

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Capaian tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum 3-14

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3-27

Gambar 3.4 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3-37

Gambar 3.5 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3-44

Gambar 3.6 Target dan Realisasi Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah 3-51

Gambar 3.7 Target dan Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif 3-56

Gambar 3.8 Target dan Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif 3-68

Gambar 3.9 Target dan Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum Yang Efektif 3-83

Gambar 3.10 Pagu dan Anggaran Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 3-99

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung atas target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dengan tersusunnya laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 dapat memberikan informasi capaian kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 dilakukan terhadap sasaran kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan rencana strategis periode 2024-2026, capaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan III meliputi persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target 90% tercapai 42,62%, persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dengan target 80% dengan sampai dengan triwulan III belum tersedia, karena hasil evaluasi dari Kementerian terkait akan dirilis pada tahun 2026, persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target 100% tercapai 102,20%, persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan target 100% tercapai 50% dan persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan target 100% tercapai 88,79%. Realisasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang berpedoman pada rencana strategis tahun 2025-2029 yaitu Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target 2,65 (sedang) belum tersedia realisasinya dikarenakan menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Persentase kebijakan bidang bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi 87,83% (efektif) atau terealisasi 117,11%, Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi sebesar 98,68% (sangat efektif) atau 131,57%, dan Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif dengan terget 75 (efektif) terealisasi 98,09% (sangat efektif) atau 130,79%.

Ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung secara umum didukung (1) adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah(2), penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*, (3) optimalisasi fasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah garapan yang diadukan oleh masyarakat, (4) penguatan kerangka regulasi dan hukum dimana harus memastikan adanya Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama yang jelas, mengikat, dan tidak tumpeng tindih. Kerangka hukum yang kuat memberikan kepastian dan landasan yang sah bagi pelaksanaan kerjasama (5) transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap proses kerja sama dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, (6) terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Forum Tanggungjawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan tim clearing hause yng dapat digunakan oleh non pelaku pengadaan untuk pengaduan/permasalahan pengadaan barang dan jasa (7) adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam Regulasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, (8), tersedianya aplikasi terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama (*e-pekasam*), aplikasi sistem informasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (*si pelempang*) untuk mempermudah layanan dan pelaksanaan kegiatan, aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat untuk kemudahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, serta monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah yang intensif dilaksanakan secara berkelanjutan, (9) asistensi/Pembinaan/Pendampingan baik kepada pelaku pengadaan (penyedia atau non penyedia) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (termasuk didalamnya penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa), (10) mengadakan kegiatan workshop/bimbingan teknis/sosialisasi/ataupun acara sejenis lainnya terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (11) 5 (lima) agenda besar dalam gerakan Reformasi Birokrasi yaitu percepatan reformasi birokrasi, island of integrity, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan, (12) koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain (1) kurangnya komitmen pimpinan daerah menjadikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai alat ukur kinerja yang strategis (2) tidak adanya Dinas terkait yang mengurus urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten Belitung selain di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, sehingga fungsi-fungsi krusial tersebut berisiko tidak berjalan optimal, (3) kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam merealisasikan rencana kerja sama, (4) koordinasi dengan perangkat Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah kurang optimal, (5) inventarisasi data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kurang optimal, (6) laporan pelaksanaan operasional dan Keuangan BUMD sering terlambat (7) masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum tepat waktu dalam melakukan input ke dalam aplikasi *si pelempang*, (8) beberapa indikator penilaian tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat (seperti indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ serta indikator kematangan UKBPJ), (9) beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang tepat dalam menentukan metode pemilihan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga antara perencanaan dengan pelaksanaan berbeda (mempengaruhi skor SiRUP yang didapat), (10) belum ditetapkannya Grand desain RB Nasional 2025-2045 dan Roadmap RB Nasional 2025-2029, (11) Perangkat Daerah belum memperbaharui standar pelayanan dan SOP, (12) sistem perencanaan, anggaran, pelaporan dan evaluasi belum terintergrasi, sehingga pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat optimal.

Dalam melaksanakan program-program dalam mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung didukung oleh anggaran sebesar Rp. 48.472.025.562,-terealisasi Rp.43.437.442.862,- atau 89,61%, meliputi Belanja Operasi dengan pagu sebesar Rp. 48.230.117.942,- terealisasi Rp. 43.204.785.762,- atau 89,58% dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp.241.907.620,-terealisasi Rp. 232.657.100,- atau 96,18%.

Selain itu, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung di dukung melalui penghargaan yang diterima yaitu Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 dengan nilai 96 dan mendapatkan peringkat pertama di tingkat Kanwil HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kategori Dwitungga dalam Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2025 dengan nilai 84, Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 88,67 dengan kategori Sangat Baik dan Hasil Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 99,4 dengan kategori AA (Istimewa).

Berdasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, dengan melihat faktor pendorong dan kendala yang dihadapi maka perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah, Pemanfaatan pedoman evaluasi (EPPD) dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arahan kebijakan nasional dan prinsip otonomi daerah, menjadikan capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah, penguatan koordinasi dan sinergi antar bagian dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pelayanan, penyusunan payung hukum yang jelas, pastikan setiap kerja sama didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan yang rinci dan mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, peningkatakan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja, melibatkan pimpinan tinggi dalam tahap awal perencanaan kerja sama, optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Belitung dengan APH dan Forkopimda, memaksimalkan koordinasi Forum TJSLP dengan Perusahaan/BUMN untuk secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan CSR/TJSLP, mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (terutama penggunaan katalog versi 6), memaksimalkan layanan dan dukungan (helpdesk/trainer) LPSE untuk membantu perangkat daerah ataupun penyedia melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Bab 1 PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi diarahkan untuk membangunan birokrasi yang professional, berintegritas, adaptif serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis. Upaya tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instani Pemerintah, salah satu komponen SAKIP adalah Pelaporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dalam rangka mengimplementasikan SAKIP maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berkewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah maka dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dengan tidak meninggalkan perencanaan periode 2024-2026, sehingga tercipta kesinambungan di masa transisi perencanaan pembangunan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung merupakan gambaran kinerja secara menyeluruh yang memberikan informasi kinerja yang terukur dan menyediakan data dan informasi sasaran strategis yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sehingga terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah. Selain itu penyusunan laporan kinerja ini juga bertujuan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kinerja periode selanjutnya, serta untuk memperkuat komitmen instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel (*good governance*).

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
   a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   c. Bagian Hukum, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
   a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
   a. Bagian Umum, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
      - Sub Bagian Protokol
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 149 Pegawai yang terdiri dari 100 PNS, 3 CPNS dan 46 P3K (17 P3K penuh waktu dan 29 P3K paruh waktu). Rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Berdasarkan Pangkat/Golongan

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah P3K		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Gol. IV	14	3	0	0	0	0	17
Gol. III	38	40	2	1	0	0	81
Gol. II	4	1	0	0	0	0	5
Gol. I	0	0	0	0	0	0	0
Gol.IX	0	0	0	0	4	3	7
Gol VII	0	0	0	0	1	3	4
Gol V	0	0	0	0	2	3	5
Gol I	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	18	11	29
Total	**56**	**44**	**2**	**1**	**25**	**21**	**149**

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pegawai Sekretariat Daerah terbagi menjadi beberapa golongan, dengan golongan PNS terbanyak yaitu golongan III sebanyak 81 pegawai atau 54,36%, kemudian golongan IV sebanyak 17 pegawai 11,41% dan golongan II terdiri dari 5 pegawai atau 3,36%. Sedangkan golongan P3K penuh waktu, dengan golongan terbanyak golongan IX sebanyak 7 pegawai atau 5,85%, kemudian golongan V sebanyak 5 pegawai atau 4,17%, golongan VII sebanyak 4 pegawai atau 3,33% dan golongan yang paling sedikit yaitu golongan I sebanyak 1 orang atau 0,83 %. Dan pegawai P3K paruh waktu yang tidak memiliki golongan ruang dengan jumlah sebanyak 29 pegawai.

Tabel 1.2
Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		CPNS		P3K		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	S-3	0	1	0	0	0	0	1
2	S-2	8	2	0	0	0	0	10
3	S-1	35	27	2	1	3	4	72
4	D-4	2	3	0	0	1	0	6
5	D-3	5	7	0	0	4	4	20
6	SLTA/Sederajat	6	4	0	0	16	9	35
7	SD	0	0	0	0	1	4	5
	Total	**56**	**44**	**2**	**1**	**25**	**21**	**149**

Pada tabel 1.2 dijabarkan bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung memiliki latar belakang pendidikan mulai SD sampai dengan S-3, dengan proporsi jenjang pendidikan S-3 sebanyak 1 orang atau 0,67%, pendidikan S-2 sebanyak 10 pegawai atau 6,71%, Pendidikan S1 terdiri dari 72 pegawai atau 48,32%, pendidikan D-4 sebanyak 5 pegawai atau 4,03%, pendidikan D-3 sebanyak 20 pegawai atau 13,42%, Pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 35 pegawai atau 23,49% dan pendidikan SD sebanyak 5 pegawai atau 3,36% dan

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Stuktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022)

Berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, maka dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) bagian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretaris Daerah**

   Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Bupati.

2. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejaheraan rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelengarakan fungsi:

   a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
   b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraaan rakyat:
   c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat;
   d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat;
   e. Pematauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat;
   f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat; dan
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

   a) Bagian Pemerintahan

   Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah. Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
   b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
f. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
g. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
h. pengoordinasian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
i. pengoordinasian administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
j. pengoordinasian pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
k. pengoordinasian penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
l. pengoordinasian toponimi dan pemetaan wilayah;
m. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
n. sinkronisasi perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
o. penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat;
p. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
q. penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
r. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
s. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati;
t. pengoordinasian proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati
u. dan Wakil pengoordinasian pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati;
v. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum;
w. pengoordinasian proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
x. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang otonomi Daerah;
y. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
z. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan naskah kerja sama Daerah:

aa. pelaksanaan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri dan luar negeri;
bb. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah dalam negeri dan luar negeri;
cc. pengoordinasian forum dan asosiasi pemerintah Daerah;
dd. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah;
ee. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam negeri dan luar negeri;
ff. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
gg. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesra menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keagamaan;
d. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
e. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;
f. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;
g. penyiapan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
h. penyiapan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
i. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
j. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar Lembaga keagamaan;

k. pengoordinasian lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
m. pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
n. penyiapan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
o. pengoordinasian kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
p. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
q. penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
r. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
s. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
t. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
u. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
v. pengoordinasian pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat;
w. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat;
x. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
y. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
z. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
aa. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan serta kemasyarakatan lainnya;

bb. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
cc. penyiapan bahan koordinasi dengan dinas terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan;
dd. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
ee. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan dan penyusunan produk hukum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang tugasnya;
c. penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan program pembentukan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
d. penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
f. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan peraturan Daerah;
g. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerah;
h. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
j. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
k. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
m. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
n. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kajian contract drafting naskah perjajian kerja sama Daerah;

q. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pelayanan hukum di Daerah;
r. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah;
s. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
t. penghimpunan serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
u. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
v. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;
w. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum Daerah;
y. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
z. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
aa. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
bb. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelengarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
c. pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
e. pengoordinasian pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
f. pengoordinasian dan penyiapan bahan terkait penyertaan modal pemerintah Daerah;
g. pengoordinasian penyusunan bahan dan data serta Analisa pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
h. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
j. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
l. pengoordinasian dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
m. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
n. pengoordinasian penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;

o. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
q. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup dan kehutanan;
s. pengoordinasian fasilitasi kegiatan dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
t. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
u. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Daerah terkait bidang tugas administrasi pembangunan;
c. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan pada Bagian Adminstrasi Pembangunan;
d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. pengoordinasian penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah;
f. fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi risiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pembangunan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
h. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak lain agar sesuai dengan program pembangunan Daerah;
i. pengoordinasian pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun pihak lain;
j. fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
k. pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah;
l. penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
m. penyusunan rencana pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
o. penyusunan laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
e. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;

f. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
g. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
h. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
i. pengidentifikasian kebutuhan pengembangan sistem informasi;
j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
k. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
l. pengelolaan informasi kontrak;
m. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan mempersiapkan solusi pemecahan di bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
o. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
p. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
q. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
r. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
s. pelaksanaan pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
t. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
u. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
v. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
w. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah dan desa;
x. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
y. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
z. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan mempersiapkan solusi pemecahan di bidang tugasnya;
aa. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
bb. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Asisten Administrasi Umum menyelengarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:

a) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang kepegawaian, tata usaha pimpinan, Staf Ahli dan pegawai, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata usaha umum, persuratan, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata usaha umum, persuratan, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;
c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
e. penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. penyiapan bahan penetapan keputusan kenaikan gaji berkala di Sekretariat Daerah;
g. penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di Sekretariat Daerah;

h. penyiapan bahan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
i. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian dan sasaran kinerja pegawai di Sekretariat Daerah;
j. penyiapan bahan penetapan kartu kepegawaian di Sekretariat Daerah;
k. penyiapan bahan administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
l. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
m. perumusan kebijakan penyelenggaraan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
n. pengoordinasian dalam rangka penyusunan, pengolahan data anggaran Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
o. pengoordinasian administrasi dan pengelolaan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
p. pembinaan dan pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan pembukuan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
q. pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara Bupati/Wakil Bupati, dan bendahara/bendahara pembantu Sekretariat Daerah;
r. penyusunan laporan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
s. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan di lingkunganSekretariat Daerah;
t. pelaksanaan sistem pengendalian intern keuangan;
u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
v. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
w. pelaksanaan penyediaan akomodasi, transportasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan pemerintah Daerah, tamu pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
x. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
y. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan, peralatan Bupati dan Wakil Bupati serta di lingkup Sekretariat Daerah;
z. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta di lingkup Sekretariat Daerah dan sewa kendaraan;
aa. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta rumah dinas Sekretaris Daerah;
bb. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
cc. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengelolaan asrama mahasiswa dan mess pemerintah Daerah di dalam/luar Daerah;

dd. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
ee. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja;
b. penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi perangkat Daerah;
c. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis Daerah;
d. penyusunan standar kompetensi jabatan;
e. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
f. penyiapan bahan penyusunan tambahan penghasilan pegawai;
g. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat Daerah;
h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
i. penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, budaya kerja, dan pola hubungan kerja;
j. penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah;
k. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik dan sistem informasi pelayanan publik;
l. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi, pelaporan survei kepuasan masyarakat;
m. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi penyusunan peta proses bisnis;
n. penghimpunan dan fasilitasi standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing perangkat Daerah;
o. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
p. pengoordinasian dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
q. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
r. penyusunan bahan laporan kinerja instansi pemerintah Daerah;
s. penyusunan road map reformasi birokrasi;
t. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
v. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
w. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan;
d. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
e. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan Daerah;
f. pemberian masukan kepada pimpinan Daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
g. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;
h. penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
i. penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat;
j. penyiapan dan penggandaan bahan materi kebijakan;
k. penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
l. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
m. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
n. memfasilitasi peliputan dan publikasi media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
o. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemeritahan, penatalaksanaan organisasi serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horizontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi.

Pemetaan permasalahan dalam penentuan prioritas dan sasaran Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan prioritas dan sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan kebutuhan dan pemetaan SDM belum optimal 2. Pengembangan kompetensi Sumber daya Manusia belum optimal	1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah 2. Pembiayaan dalam memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor public dan non publik masih terbatas 3. Perbaikan sistem birokrasi pemerintah	1. Tuntutan dan transparansi akuntabilitas publik 2. Persaingan daya saing wilayah dalam skala global 3. Perdagangan bebas dan arus globalisasi ekonomi	1. Arah kebijakan nasional dan penyesuaian RPJMN 2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 3. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik 4. Pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah	1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah 2. Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu 3. Stabilitas sosial dan politik regional	1. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia yang adaptif dan kompeten 2. Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 3. Peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor 4. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi untuk pengambilan kebijakan
2. Tata kelola Pemerintahan	1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan belum optimal 2. Transparansi dan akuntabilitas belum maksimal					
3. Data dan informasi pembangunan daerah	1. Kuantitas dan kualitas data masih kurang					

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dijabarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan isu strategis Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia yang adaptif dan kompeten

2. Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
3. Peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor
4. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi untuk pengambilan kebijakan

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
   a. Tugas dan Fungsi
   b. Struktur Organisasi
   c. Aspek Strategis Organisasi
   d. Sistematika Pelaporan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
   a. Target Kinerja Tahun 2025 (Periode Renstra 2024-2026 dan Periode Renstra 2025-2029)
   b. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Induk 2024-2026 dan PK Perubahan 2025-2029)
5. Bab III Akuntabiltas Kinerja
   a. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Periode Renstra 2024-2026 dan Periode Renstra 2025-2029)
   b. Kinerja Lainnya Tahun 2025
   c. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025
6. Bab IV Penutup
   a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2025
   b. Rencana Tindaklanjut Tahun 2026
7. Lampiran

Bab 2
PERENCANAAN KINERJA

A. Target Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Periode Renstra 2024-2026 dan Periode Renstra 2025-2029)

Penetapan target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, dengan visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029 adalah:

Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera"

Implementasi visi dijabarkan kedalam misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan bermartabat.
4. Membangunan infrastruktur yang berkualitas secara merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung maka misi yang selaras meliputi 3 (tiga) misi yaitu 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 2) Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan bermartabat. Sehingga dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,65 (sedang)	2,75 (sedang)	2,85 (sedang)	2,95 (sedang)	3,2 (sedang)	3,41 (sedang)
	Implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	75% (Efektif)	75% (Efektif)	80% (Efektif)	82% (Efektif)	83% (Efektif)	85% (Efektif)
	Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang efektif	Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang efektif	75% (Efektif)	75% (Efektif)	80% (Efektif)	82% (Efektif)	83% (Efektif)	85% (Efektif)
	Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang efektif	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	75% (Efektif)	75% (Efektif)	80% (Efektif)	82% (Efektif)	83% (Efektif)	85% (Efektif)

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (sasaran) strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   Pengukuran kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada setiap tahun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan peringkat, skor dan status kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan melalui proses penilaian kinerja beberapa tahapan. Sedangkan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	Skor Kinerja	Status KInerja
1	0,00 - 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 - 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

2. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif
   Pengukuran kinerja sasaran diukur untuk mengetahui efektivitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kinerja dikatakan efektif jika pencapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan kesra diimplementasikan. Indikator kinerja program meliputi 1) persentase penyelesaian sengketa tanah garapan, 2) persentase rekomendasi kebijakan bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti, 3) persentase rekomendasi kebijakan bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan 4) persentase rekomendasi kebijakan bagian hukum yang ditetapkan.
   Interval efektivitas kebijakan terdiri dari:
   - 1-25 % (Gagal)
   - 26-50% (Tidak Efektif)
   - 51 - 74 % (Kurang Efektif)
   - 75 - 89 % (Efektif)
   - 90 - 100 % (Sangat Efektif)
3. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif
   Pengukuran kinerja sasaran diukur untuk mengetahui efektivitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan. Kinerja dikatakan efektif jika pencapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan pembangunan diimplementasikan. Indikator kinerja program meliputi 1) persentase rekomendasi kebijakan bagian perekonomian dan SDA yang ditndaklanjuti, 2) persentase kebijakan program pembangunan daerah yang dievaluasi, 3) indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dan 4) persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan.
   Interval efektivitas kebijakan terdiri dari:
   - 1-25 % (Gagal)
   - 26-50% (Tidak Efektif)
   - 51 - 74 % (Kurang Efektif)
   - 75 - 89 % (Efektif)
   - 90 - 100 % (Sangat Efektif)
4. Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum Yang Efektif
   Pengukuran kinerja sasaran diukur untuk mengetahui efektivitas kebijakan bidang administrasi umum. Kinerja dikatakan efektif jika pencapaian indikator kinerja program bidang administrasi umum diimplementasikan. Indikator kinerja program meliputi 1) persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan, 2) indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah, 3) nilai survey kepuasan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah, 4) nilai survey kepuasan pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah, 5) persentase pelayanan administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, 6) persentase pelaksanaan kebijakan penataan organisasi dan 7) persentase pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

Interval efektivitas kebijakan terdiri dari:

- 1-25 % (Gagal)
- 26-50% (Tidak Efektif)
- 51 - 74 % (Kurang Efektif)
- 75 - 89 % (Efektif)
- 90 - 100 % (Sangat Efektif)

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan, sehingga perencanaan kinerja disusun dengan mengacu pada pada dokumen perencanaan periode 2025-2029 dan periode sebelumnya. Sehingga pencapaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung periode 2024-2026 perlu untuk dilakukan pengukuran kinerja, sehingga terdapat kesinambungan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung periode 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesra		Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesra	persen	80%	90%	100%
	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Administrasi Umum	persen	66,66%	80%	100%
	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Pemerintahan dan Kesra	persen	100%	100%	100%
Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan		Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100%	100%	100%

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung periode 2024-2026 terdapat 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

   Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan membandingkan ketercapaian indikator terhadap target indikator tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 terkait bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	
		Nilai SAKIP	
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	
4	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Persen
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah.	Tahun

Formulasi Penghitungan:

Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra yang tercapai pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra X 100%

Keterangan:
1. Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0
2. Indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN.
3. Indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah.

2. Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum.

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan daerah di bidang administrasi umum dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD yang memenuhi target terhadap jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD terkait bidang administras umum meliputi 4 (empat) indikator terdiri dari:

Tabel 2.4
Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	
		Nilai SAKIP	
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	

Formulasi Penghitungan:

Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum X 100%

Keterangan:
- Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0

3. Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan menghitung jumlah persentase ketercapaian indikator tujuan dan sasaran RPD terhadap jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi 3 (tiga) indikator terdiri dari

Tabel 2.5
Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	

Formulasi Penghitungan:

Jumlah persentase capaian indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

4. Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan, yaitu dengan membandingkan ketercapaian indikator terhadap target yang ditetapkan terkait dengan tujuan dan sasaran dalam RPD terkait bidang perekonomian dan pembangunan yang terdiri dari 6 (enam) indikator terdiri dari:

Tabel 2.6
Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Terwujudnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen
3	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	persen
4	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen

Formulasi Penghitungan:

Jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang tercapai pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan X 100%

Keterangan:
- Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0

5. Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan, yaitu dengan menghitung jumlah persentase ketercapaian indikator tujuan dan sasaran RPD terhadap jumlah indikator

tujuan dan sasaran RPD bidang perekonomian dan pembangunan yang tertuang dalam RPD terdiri dari 6 (enam) indikator terdiri dari:

Tabel 2.7
Sasaran dan Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Terwujudnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen
3	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	persen
4	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen

Formulasi Penghitungan:

Jumlah persentase capaian indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Induk Sesuai Renstra 2024-2026 dan PK Perubahan Sesuai Renstra 2025-2029)

Perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan target kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Melalui perjanjian kinerja maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja dapat dilakukan revisi atau perubahan yang disebabkan oleh beberapa hal:

1. Terjadi penggantian atau mutasi pejabat
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Oleh karena itu, pada Tahun 2025 yang merupakan merupakan masa transisi perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung, sehingga untuk memastikan kesinambungan dan berkelanjutan perencanaan pembangunan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menyusun Rencana Strategis periode 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung 2025-2029. Sehingga untuk memastikan relevansi terhadap pelaksanaan dan

pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang selaras dengan perencanaan periode 2025-2029 maka dilakukan perubahan perjanjian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah periode 2025-2029.

Dalam Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Indikator dan target indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesra	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesra	90%
2	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	80%
3	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
4	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%
5	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%

Jumlah Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
A	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Rp 87.688.398**	**APBD**
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.858.800	APBD
B	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Rp 36.339.686.072**	**APBD**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 48.614.300	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20.797.477.412	APBD

	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	210.000.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.537.445.040	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	900.000.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.636.443.200	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.818.297.000	APBD
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.741.413.794	APBD
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.451.551.200	APBD
10	Penataan organisasi	Rp	243.024.600	APBD
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	1.955.419.526	APBD
C	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Rp**	**12.084.398.276**	**APBD**
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp	783.051.794	APBD
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp	10.783.611.700	APBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	500.052.883	APBD
4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp	17.681.900	APBD
D	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Rp**	1.165.489.580	**APBD**
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	122.915.992	APBD
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	512.984.000	APBD
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	486.709.275	APBD
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	48.880.313	APBD
	Total Anggaran	**Rp**	**49.614.432.728**	

Tabel 2.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Realisasi
			2025	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,65 (sedang)	-	-
2	Implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	75% (Efektif)	-	-
3	Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang efektif	Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang efektif	75% (Efektif)	-	-
4	Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang efektif	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	75% (Efektif)	-	-

Jumlah Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
A	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Rp.**	**23.322.800**	**P-APBD**
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	23.322.800	P-APBD
B	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Rp**	**35.896.688.437**	**P-APBD**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp	43.071.400	P-APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	20.797.043.012	P-APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	210.000.000	P-APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.288.707.449	P-APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	10.000.000	P-APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.676.443.200	P-APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3.552.112.000	P-APBD
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.741.413.794	P-APBD
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.797.793.200	P-APBD
10	Penataan organisasi	Rp	208.482.400	P-APBD
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	1.571.621.982	P-APBD
C	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Rp**	**10.832.215.550**	**P-APBD**

	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
A	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Rp. 23.322.800**	**P-APBD**
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.322.800	P-APBD
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 626.698.600	P-APBD
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 9.807.606.350	P-APBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 16.653300	P-APBD
D	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Rp** 795.516.775	**P-APBD**
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 211.893.100	P-APBD
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 98.344.800	P-APBD
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 460.098.475	P-APBD
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 25.180.400	P-APBD
	Total Anggaran	**Rp 47.547.743.562**	

Bab 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung bertangungjawab untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara terget pencapain indikator kinerja tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Periode Renstra 2024-2026 dan Periode Renstra 2025-2029)

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 telah ditetapkan bahwa sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Implemetasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejakteraan rakyat yang efektif
3. Implemetasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif
4. Implemetasi kebijakan bidang umum yang efektif

Sasaran tersebut di atas terkait erat dengan dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Belitung. Selanjutnya sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung telah dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan dan juga dalam rencana anggaran Tahun 2025.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan. Sehingga agar lebih mudah dalam menginterpretasikan pencapaian sasaran dan program/kegiatan maka perlu dilakukan pemetaan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 s.d 100 %	Baik Sekali
2	70 s.d 95 %	Baik
3	55 s.d 70 %	Cukup
4	< 55	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Belitung Tahun 2025 dengan realisasinya.

1. Ringkasan Kinerja

A. Ringkasan Kinerja Sesuai Dengan Renstra 2024-2026

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran strategis tercapai atau tidak.

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung atas tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima) indikator kinerja menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ringkasan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Tujuan							
1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	90	42,86	47,62	Belum tercapai
2	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	50	50	Belum tercapai
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persen	80	n/a	n/a	Belum tersedia

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
	Administrasi Umum						
1.2	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	102,20	102,20	Tercapai
2.1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	88,79	88,79	Belum tercapai

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung sebagaimana tabel 3.2 merupakan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menetapkan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025.

B. Ringkasan Kinerja Sesuai Dengan Renstra 2025-2029

Tabel 3.3
Ringkasan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	2,65 (Sedang)	n/a	n/a	Belum tersedia
1.1	Implementasi kebijakan bidang bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	Persentase kebijakan bidang bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	Persen	75 (efektif)	87,83 (efektif)	117,11	Tercapai
1.2	Implementasi kebijakan bidang perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan	Persen	75 (efektif)	98,68 (sangat efektif)	131,57	Tercapai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
	dan pembangunan yang efektif	pembangunan yang efektif					
1.3	Implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	Persen	75 (efektif)	98,09 (sangat efektif)	130,79	Tercapai

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2025-2029. Pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menetapkan perubahan perjanjian kinerja dengan realisasi indikator pada triwulan IV, dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum tersedia realisasinya dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja telah tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

2. Uraian Kinerja

A. Uraian Kinerja Sesuai Dengan Renstra 2024-2026

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yang mengacu pada rencana strategis 2024-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada rencana strategis 2025-2029. Sebelum diuraikan capaian kinerja tahun 2025, berikut disajikan target dan realisasi kinerja 2024-2026, sehingga dapat diketahui progres ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang mengacu pada Renstra 2024-2026.

Tabel 3.4
Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Periode Renstra Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi			Persentase (%)		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Tujuan										
T.1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									

No	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi			Persentase (%)		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80	90	100	85,71	42,86		107,14	47,62	
T.2	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan									
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	66,67	50		66,67	50	
Sasaran										
S.1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum									
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	66,66	80	100	75	n/a		112,51	n/a	
S.2	Meningkatnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	102,14	102,20		102,14	102,20	
S.3	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan									
1	Persentase Capaian Tujuan dan SasaranPembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	87,50	88,79		87,50	88,79	

2.1 Sasaran Strategis (tujuan) 1: Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan Pertama yaitu meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan 1 (satu) indikator yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Target dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan) 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
TUJUAN							
1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	90	42,86	47,62	Belum tercapai

Pencapaian sasaran strategis (tujuan) 1: meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 2025 sampai dengan triwulan III terealisasi 42,86% atau tercapai 47,62%.

Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan membandingkan ketercapaian indikator terhadap target indikator tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 terkait bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 7(tujuh) indikator yaitu 1)Indeks Reformasi Birokrasi, 2) Opini BPK, 3) Nilai SAKIP,4) Indeks Profesionalitas ASN 5) Indeks Pembangunan Manusia, 6) Angka Harapan Hidup dan 7) Rata-rata lama sekolah, dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 90%.

Pada tahun 2025, capaian persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar 42,86% dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90%	42,86%

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	2025	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		B	Belum tersedia
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK		WTP	Belum tersedia
		Nilai SAKIP		BB	Belum tersedia
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN		71-80 (sedang)	Belum tersedia
4	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	74,77	75,29
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,42	73,13
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah.	Tahun	8,8	9,11

Berdasarkan data pada tabel 3.6, dapat diketahui bahwa ketercapaian indikator persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target 90% sampai dengan triwulan III terealisasi 42,86%, Ketercapaian kinerja diukur berdasarkan ketercapaian indikator tujuan/sasaran Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Pembanguan Daerah Kabupaten Belitung 2024-2026 terkait bidang administrasi umum dan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum tersedia datanya

kinerjanya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK dan Nilai SAKIP, masih menunggu dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara, dan data akan dirilis pada tahun 2026 dan 3 (tiga) indikator lainnya telah melampaui target yaitu pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah. Sehingga dalam rangka ketercapaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung senantiasa melakukan koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah teknis, instansi vertikal maupun intansi pusat melalui bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumusan penghitungan capaian kinerja persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra yang tercapai pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra) X 100%

Keterangan:

1. Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0
2. Indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN.
3. Indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah.

Realisasi indikator kinerja tujuan strategis mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar 42,86%. Hal tersebut dikarenakan realisasi capaian kinerja diukur sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Perkembangan realisasi indikator kinerja persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Tahun 2024-2026 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan periode tahun 2024-2026 disajikan pada gambar 3.1 berikut:

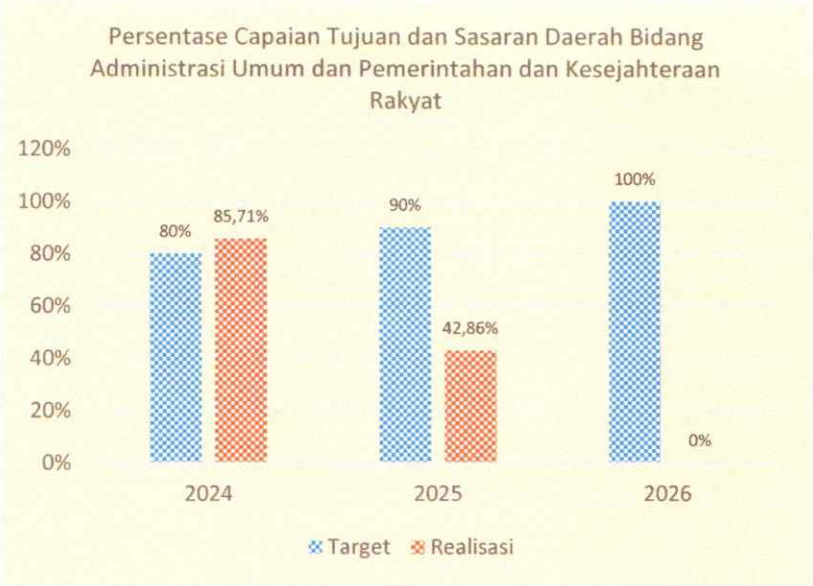

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 merupakan tahun kedua Rencana Stategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung periode 2024-2026. Capaian indikator kinerja persentase ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target 90% sampai dengan triwulan III terealisasi 42,86%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024-2026 maka capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	42,86%	42,86

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP dan opini WTP.
2. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.
3. 5 (lima) agenda besar dalam gerakan Reformasi Birokrasi yaitu percepatan reformasi birokrasi, island of integrity, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan.
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung.
5. Koordianasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait dengan dokumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait kemungkinan penyediaan sistem yang terintegrasi pelaporan capaian kinerja.
7. Penguatan perencanaan dan optimalisasi pengukuran serta pelaporan kinerja.
8. Melaksanakan fasilitasi penyusunan pohon kinerja dan cas cading Perangkat Daerah.
9. Pengendalian kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan laporan capaian kinerja per triwulan.
10. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan dalam mendukung peningkatan IP ASN.
11. Koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun dengan instansi vertikal.
12. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melasanakan program pemberian biaya pendidikan dan beasiswa kepada masyarakat.
13. Adanya Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat.
14. Adanya Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pemberian beasiswa.
15. Penguatan kerangka regulasi dan hukum dimana harus memastikan adanya Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama yang jelas, mengikat, dan tidak tumpeng tindih. Kerangka hukum yang kuat memberikan kepastian dan landasan yang sah bagi pelaksanaan kerja sama.
16. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk memantau ketercapaian kinerja.
17. Adanya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terintegrasi, terutama reformasi birokrasi tematik.
2. Belum ditetapkannya Grand desain RB Nasional 2025-2045 dan Roadmap RB Nasional 2025-2029.
3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pangkalpinang terkait pengelolaan barang milik daerah.
4. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang belum optimal.
5. Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah.
6. Ada sistem perencanaan, anggaran, pelaporan dan evaluasi belum terintergrasi pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat optimal.
7. Optimalisasi koordinasi leading sektor belum berjalan dengan baik
8. Terdapat bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang merupakan mitra Perangkat Daerah belum dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung ketercapaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
9. Keterlambatan terkait pembahasan perubahan Peraturan Bupati terkait beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan
10. Keterbatasan sumber daya manusia pada masing-masing bagian

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Membangun budaya kerja ASN BerAKHLAK di Kabupaten Belitung sebagai bentuk penguatan Reformasi Birokrasi.
2. Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025.
4. Melaksanakan rapat pimpinan terkait evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan instansi pusat terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
6. Koordinasi dengan perangkat daerah untuk penyediaan sistem yang terintegrasi guna mempermudah pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

8. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Beasiswa persial untuk memberikan akses pendidikan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat
9. Melakukan evaluasi dalam rangka optimalisisi kinerja lebih lanjut terkait program-program yang belum terselesaikan
10. Penguatan kebijakan dan pengangaran dalam mendorong ketercapaian kinerja yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat
11. Adanya kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dari Kemenkumham di Kabupaten Belitung dan saling bersinergi dalam rangka penangananan dan penyelesaian permasalahan hukum
12. Optimalisasi sumber daya manusia dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan efektif
13. Penguatan koordinasi lintas sektor.

2.2 Sasaran Strategis (Sasaran) 1: Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan oleh Sekrearіat Daerah Kabupaten Belitung dalam mencapainya. Terdapat 2 (dua) sasaran Strategis yang mendorong tujuan pertama pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Pada sasaran pertama yaitu meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dengan1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum. Target dan realisasi kinerja strategis tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	persen	80	n/a	n/a	Belum tersedia

Capaian kinerja sasaran strategis 1: meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum tahun 2025 target 80% dengan realisasi sampai triwulan III belum tersedia.

Uraian kinerja atas indikator meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum sebagai berikut:

2.2.1 Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang administrasi umum dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD yang memenuhi target terhadap jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD terkait bidang administras umum meliputi 4 (empat) indikator yaitu 1) Indeks Reformasi Birokrasi, 2) Opini BPK, 3) Nilai SAKIP dan 4) Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%.

Pada tahun 2025, capaian persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum sampai dengan triwulan III belum tersedia realisasinya. Hal tersebut dikarenakan data menunggu rilis dari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan rilis pada tahun 2026, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi UmumTahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	80%	n/a

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Administrasi Umum Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	2025	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		B	n/a
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK		WTP	n/a
		Nilai SAKIP		BB	n/a
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN		71-80 (sedang)	n/a

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ketercapaian indikator persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dengan melihat ketercapaian Indikator Kinerja Utama

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 di bidang administrasi umum dengan target 80% sampai dengan triwulan III belum tersedia realisasinya, dikarenakan terdapat 3 (tiga) indikator capaian Rencana Pembangunan Daerah yang belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Rumusan penghitungan capaian sebagaimana berikut:

Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum pada tahun berkenaan/jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum X 100%

Keterangan:
- Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0

Realisasi indikator kinerja tujuan strategis belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan realisasi capaian kinerja diukur sampai dengan triwulan III tahun 2025.
Perkembangan realisasi persentase ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum tahun 2024-2026 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.2 berikut:

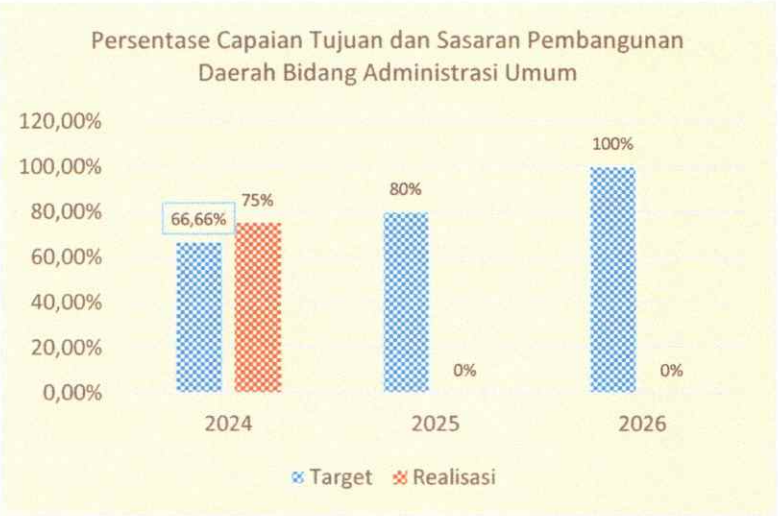

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum

Pada gambar 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ketercapaian indikator kinerja persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum pada 2015 dengan target 80% sampai dengan triwulan III belum tersedia realisasinya, menunggu rilis dari Kementerian yang membidangi, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024-2026 maka capaian kinerja belum dapat diukur dikarenakan data tahun 2025 belum tersedia.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	100%	n/a	n/a

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP dan opini WTP.
2. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.
3. 5 (lima) agenda besar dalam gerakan Reformasi Birokrasi yaitu percepatan reformasi birokrasi, *island of integrity*, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan.
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung.
5. Koordianasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait dengan dokumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait kemungkinan penyediaan sistem yang terintegrasi pelaporan capaian kinerja.
7. Penguatan perencanaan dan optimalisasi pengukuran serta pelaporan kinerja.
8. Melaksanakan fasilitasi penyusunan pohon kinerja dan cas cading Perangkat Daerah.
9. Pengendalian kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan laporan capaian kinerja per triwulan.
10. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan dalam mendukung peningkatan IP ASN.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terintegrasi, terutama reformasi birokrasi tematik.
2. Belum ditetapkannya Grand desain RB Nasional 2025-2045 dan Roadmap RB Nasional 2025-2029.
3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pangkalpinang terkait pengelolaan barang milik daerah.

4. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang belum optimal.
5. Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah.
6. Sistem perencanaan, anggaran, pelaporan dan evaluasi belum terintergrasi, sehingga pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat optimal.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Membangun budaya kerja ASN BerAKHLAK di Kabupaten Belitung sebagai bentuk penguatan Reformasi Birokrasi.
2. Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025.
4. Melaksanakan rapat pimpinan terkait evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi pusat terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
6. Koordinasi dengan perangkat daerah untuk penyediaan sistem yang terintegrasi guna mempermudah pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Rapat Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah

Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja

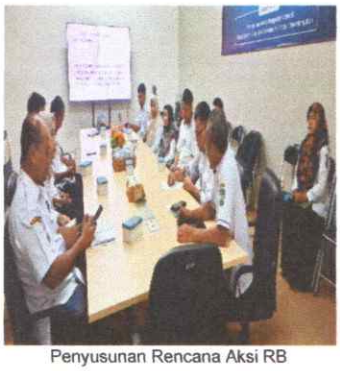

Penyusunan Rencana Aksi RB

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Rapim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Verifikasi Lapangan TOP 10 Kompetensi Inovasi Pelayanan

Rapat Penyusunan Peta Jabatan OPD

Audensi Pelaksanaan Rusi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kep. Babel

Rapat Evaluasi Kinerja Setda

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Administrasi Umum Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	1.1	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**63,16**	**63,16**						
		1.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**71**	**0**	**0**						
		1.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**70**	**70**						
		1.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**33,33**	**37,5**						
		1.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**67,82**	**52,33**						
1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	1.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	9	90	48.614.300	32.838.500	67,55	2	2	100
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	1.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	20.797.477.412	13.098.917.808	62,98	6	6	100
1.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	1.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	20	8	40	210.000.000	50.737.840	24,16	1	1	100
1.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	65	65	3.537.445.040	1.895.061.333	53,57	9	9	100
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	4.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	8	0	0	900.000.000	0	0,00	2	2	100

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	75	75	2.636.443.200	1.548.974.426	58,75	5	5	100
1.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	4	66,67	2.818.297.000	1.515.547.607	53,78	6	6	100
1.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	82	82	1.741.413.794	845.696.441	48,56	1	1	100
1.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	5	45,45	1.451.551.200	794.015.290	54,70	2	2	100
1.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	1.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	1	14,29	243.024.600	84.913.164	34,94	8	8	100
1.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	1.11.1	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	9	75	1.955.419.526	901.905.589	46,12	15	15	100
								36.339.686.072	**20.768.607.998**	**57,15**	**57**	**57**	100

Pada tabel 3.11 diuraikan bahwa dalam mencapai sasaran meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Rata-rata capaian sasaran program tahun 2025 sebesar 46,86% belum mencapai target dikarenakan realisasi capaian sampai dengan triwulan III, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran program didukung dana sebesar Rp. 20.768.607.998,- atau 57,15% dari anggaran sebesar Rp.36.614.686.027,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 11 (sebelas) indikator dari rencana sebanyak 11 (sebelas) indikator serta OH sebanyak OH 57 atau 100% dari rencana sebanyak 57 OH terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian umum, bagian organisasi dan bagian prokopim.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output tercapai 46,86% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 57,15%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 46,86% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
2. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP
3. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku
4. Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah
5. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
10. Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan
11. Terlaksananya keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dengan indikator dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi sebesar 90% dan belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp. 32.838.500,- atau 67,55% dari anggaran sebesar Rp. 48.614.300,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 9 Dokumen atau 90% dari rencana sebanyak 10 dokumen, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 90 % dan capaian penggunaan dana sebesar 67,55%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 90% lebih rendah dari capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 2** terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan SOP dengan indikator dokumen keuangan Perangkat Daerah sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp. 13.098.917.808,- atau 62,98% dari anggaran sebesar Rp. 20.797.477.412,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 2 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 2 dokumen, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 62,98%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 3** terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan indikator terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah tercapai 40%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.50.737.840.,- atau 24,16% dari anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 8 orang atau 40% dari rencana sebesar 20 orang, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 40% lebih besar dari pada penggunaan dana sebesar 24,16%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 40% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 4** terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah dengan indikator terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah tercapai 65%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp. 1.895.061.333,- atau 53,57% dari anggaran sebesar Rp. 3.537.445.040,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 65% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 9 orang atau 100% dari rencana sebanyak 9 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 65 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 53,57%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 65% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 5** terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan indikator jenis barang milik daerah terealisasi sebesar 0%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 0 jenis atau 0% dari rencana sebanyak 8 jenis, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 0% dan capaian penggunaan dana sebesar 0%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 0% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 6** tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran terealisasi 75%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi.Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 1.548.974.426,- atau 58,75% dari anggaran sebesar Rp.2.636.443.200,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 75% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 75 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 58,75%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 75% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 7** terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator barang milik daerah dalam kondisi baik tercapai 66,67%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 1.515.547.607,- atau 53,78% dari anggaran sebesar Rp.2.818.297.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 4 Jenis atau 66,67% dari rencana sebanyak 6 Jenis, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 66,67% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 53,78%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 66,67% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 8** tersedianya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan indikator administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tercapai 82%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.848.696.441,- atau 48,56% dari anggaran sebesar Rp.1.741.413.794,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 82% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 82% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 48,56%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 82% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 9** tersedianya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan indikator kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terealisasi sebesar 45,45%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 794.015.290,- atau 57,40% dari anggaran sebesar Rp.1.451.551.200,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 5 paket atau 45,45% dari rencana sebanyak

11 paket , serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 45,45% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 57,40%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 45,45% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 10** tersedianya dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan dengan indikator dokumen penataan organisasi terealisasi sebesar 14,29%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 84.913.164,- atau 34,94% dari anggaran sebesar Rp.243.024.600,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 1 dokumen atau 14,29% dari rencana sebanyak 7 dokumen, serta OH sebanyak 8 orang atau 100% dari rencana sebanyak 8 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 14,29% dan capaian penggunaan dana sebesar 34,94%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 14,29% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 11** terlaksananya keprotokoleran, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan sesuai dengan SOP dengan indikator laporan kegiatan keprotokoleran, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan terealisasi sebesar 75%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 901.905.589,- atau 46,12% dari anggaran sebesar Rp.1.955.419.526,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 9 laporan atau 75% dari rencana sebanyak 12 laporan, serta OH sebanyak 15 orang atau 100% dari rencana sebanyak 15 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 75% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 46,12%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 75% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

2.3 Sasaran Strategis (Sasaran) 1: Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat didukung oleh (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	102,20	102,20	Tercapai

Capaian kinerja sasaran strategis 2: meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2025 dengan target 100% terealisasi 102,20%.

Uraian kinerja atas indikator meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

2.3.1 Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan menghitung jumlah persentase ketercapaian indikator tujuan dan sasaran RPD terhadap jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi 3 (tiga) indikator yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia, 2) Angka Harapan Hidup, dan 3) Rata-Rata Lama Sekolah, dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%.

Pada tahun 2025, persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan triwulan III realisasinya tercapai 102,20% dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran PembangunanDaerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	102,20%

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		74,77	75,29	100,70
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		71,42	73,13	102,39
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah		8,8	9,11	103,52

Capaian sasaran strategis meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2025 dengan mengitung rata-rata persentase ketercapain Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan kesra tercapai 102,20%. Capaian kinerja diukur berdasarkan rata-rata persentase ketercapaian kinerja indikator tujuan/sasaran RPD bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target sebagaimana capaian pada tabel 3.14.

Rumusan penghitungan capaian sebagaimana berikut:

Jumlah persentase capaian indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Realisasi indikator kinerja tujuan strategis meningkat sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar 102,20%.
Perkembangan realisasi persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2024-2026 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.3 berikut:

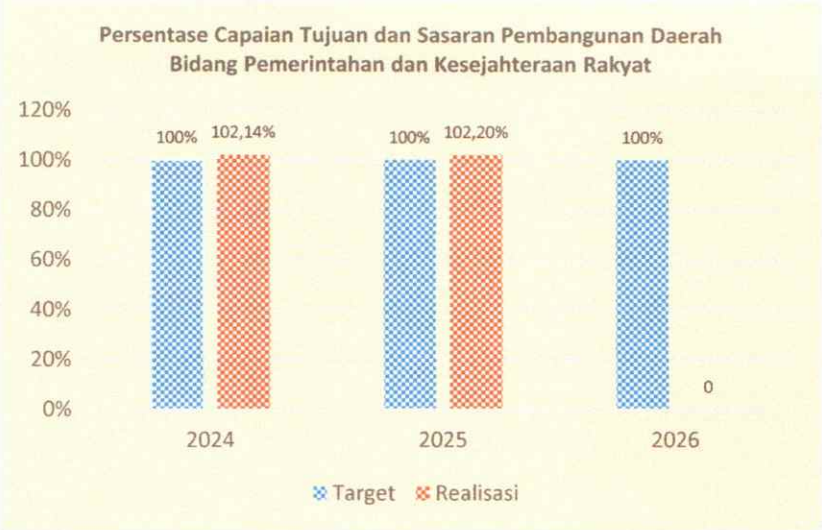

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada gambar 3.3, dapat dilihat capaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2025 yang merupakan tahun kedua Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 dengan target 100% tercapai 102,20%. jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024-2026 maka capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	102,20%	102,20

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun dengan instansi vertikal
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melasanakan program pemberian biaya pendidikan dan beasiswa kepada masyarakat

3. Adanya Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat
4. Adanya Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pemberian beasiswa
5. Penguatan kerangka regulasi dan hukum dimana harus memastikan adanya Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama yang jelas, mengikat, dan tidak tumpeng tindih. Kerangka hukum yang kuat memberikan kepastian dan landasan yang sah bagi pelaksanaan kerja sama
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk memantau ketercapaian kinerja
7. Adanya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Optimalisasi koordinasi leading sektor belum berjalan dengan baik
2. Terdapat bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang merupakan mitra Perangkat Derah belum dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung ketercapaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
3. Keterlambatan terkait pembahasan perubahan Peraturan Bupati terkait beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan.
4. Keterbatasan sumber daya manusia pada masing-masing bagian.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Beasiswa persial untuk memberikan akses pendidikan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat
2. Melakukan evaluasi dalam rangka optimalisisi kinerja lebih lanjut terkait program-program yang belum terselesaikan
3. Penguatan kebijakan dan pengangaran dalam mendorong ketercapaian kinerja yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat
4. Adanya kerjasama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dari Kemenkumham di Kabupaten Belitung dan saling bersinergi dalam rangka penangananan dan penyelesaian permasalahan hukum
5. Optimalisasi sumber daya manusia dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan efektif
6. Penguatan koordinasi lintas sektor

Dalam mendukung ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Rapat Pelaksanaan Pemberian Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pariwisata Palembang Dengan Pemkab Belitung

Rapat Pembahasan Rencana Kerja BPJS Dengan Pemkab Belitung

Rapat Verifikasi Usulan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin

Rapat Pembahasan Raperkada dengan Perangkat Daerah

Rapat Pembahasan Jawaban Gugatan Perkara Nomor:8/G/2025/PTUN-PGP

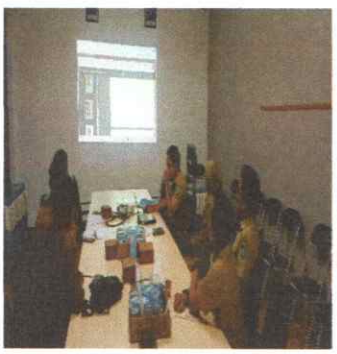

Rapat Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung B12

Rapat Harmonisasi Raperkada dengan Kanwil Hukum

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**1.1**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**Persen**	**100**	**50,00**	**50,00**						
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	1.1.1.	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	2	1	50	24.858.800	12.455.381	50,10	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**50,00**	**24.858.800**	**12.455.381**	50,10	**1**	**1**	
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**2.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**75,00**	**75,00**						
		2.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**91,20**	**91,20**						
		2.3	**Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi**	**persen**	**100**	**90,47**	**90,47**						
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	4	57,14	783.051.794	473.582.197	60,48	4	4	100
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	0	0	10.783.611.700	8.303.082.594	77,00	8	8	100
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	711	806	113,36	500.052.882	196.445.229	39,28	11	11	100
2.4	Terlaksananya Kerjasama Daerah	2.4.1	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	1	50	17.681.900	7.982.500	45,15	2	2	100
Capaian Rata-Rata								**12.084.398.276**	**8.981.092.520**	**74,32**	**25**	**25**	

Pada tabel 3.15 dijabarkan bahwa dalam mencapai sasaran meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra didukung oleh 2 (dua) Program dengan sasaran:

1. Terwujudnya Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Rata-rata capaian **sasaran program 1** terwujudnya proses penyelesaian tanah garapan dengan indikator persentase penyelesaian sengketa tanah garapan terealisasi 50%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Sampai dengan triwulan III capaian sasaran program didukung dengan dana sebesar Rp. 12.455.381,- atau 50,10% dari anggaran sebesar Rp. 24.858.800,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) indikator dari rencana sebanyak 1 (satu) indikator serta OH sebanyak OH 1 atau 100% dari rencana sebanyak 1 OH yang dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50%, lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 50,10%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terselenggaranya fasilitasi penyelesaian mediasi sengketa tanah garapan dengan indikator dokumen berita acara fasilitasi penyelesaian mediasi sengketa tanah garapan sebesar 50%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp. 12.455.381,- atau 50,10% dari anggaran sebesar Rp. 24.858.800,- dan indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 1 berita acara dari rencana sebanyak 2 berita acara, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih kecil dari pada penggunaan dana sebesar 50,10%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran program 2** meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 85,56%, dan telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian ini didukung dengan dana sebesar Rp.8.981.092.520,- atau 74,32 % dari anggaran sebesar Rp.12.084.398.276,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 4 (empat) indikator dari rencana sebanyak 4 (empat) indikator serta OH sebanyak OH 25 atau 100% dari rencana sebanyak 25

OH yang dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 85,56%, lebih tinggi dari pada capaian penggunaan dana sebesar 74,32%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 85,56% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.
Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di dukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
3. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan di bidang Hukum
4. Terlaksananya Kerja Sama Daerah

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator dokumen administrasi tata pemerintahan sebesar 57,14%, dan belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.473.582.197,- atau 60,48% dari anggaran sebesar Rp.783.051.794,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 4 dokumen atau 57,14% dari rencana sebanyak 7 dokumen, serta OH sebanyak 4 orang atau 100% dari rencana sebanyak 4 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 57,14%, lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 60,48%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 57,14% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 2** pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dengan indikator dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar 0%, dan belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.8.303.082.594,- atau 77,00% dari anggaran sebesar Rp.10.783.611.700,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 0 Dokumen atau 0% dari rencana sebanyak 5 dokumen, serta OH sebanyak 8 orang atau 100% dari rencana sebanyak 8 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 0% lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 77,00%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 0% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 3** pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang hukum dengan indikator produk hukum daerah yang terhamonisasi sebesar 113,36%, dan telah melampaui target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana RP.196.445.229,- atau 39,28% dari anggaran sebesar Rp.500.052.882,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 806 dokumen atau 113,36% dari rencana sebesar 711 dokumen, serta OH sebanyak 11 orang atau 100% dari rencana sebanyak 11 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 113,36% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 39,28%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 113,36% lebih tinggi dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 4** terlaksananya kerjasama daerah dengan indikator dokumen kerjasama daerah sebesar 50%, dan belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana RP.7.982.500,- atau 45,15% dari anggaran sebesar Rp.17.681.900,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 1 dokumen atau 50% dari rencana sebesar 2 dokumen, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 45,15%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

2.4 Sasaran Strategis (Tujuan) 2: Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Tujuan strategis kedua yaitu meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan 1 (satu) indikator yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan. Target dan realisasi kinerja tujuan ke-2 tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan) 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
TUJUAN							
1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	50	50	Belum tercapai

Pencapaian sasaran strategis (tujuan) 2: meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2025 dengan capaian sebesar 50%.

Uraian kinerja atas indikator meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

2.4.1 Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan, yaitu dengan membandingkan ketercapaian indikator terhadap target yang ditetapkan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran dalam RPD terkait bidang perekonomian dan pembangunan yang terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu 1) Indeks gini, 2) Pertumbuhan ekonomi, 3) Persentase penduduk miskin, 4) Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan, 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (tujuan RPD) dan 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sasaran RPD), dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%.

Pada tahun 2025, capaian persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang perekonomian dan pembangunan sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar 50%, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	50%

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	2024	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini		0,247-0,252	0,205
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,6	4,54
3	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,3	6,44
4	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen	65,85	Belum tersedia
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen	69,26	69,27
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	69,26	69,27

Capaian sasaran strategis (tujuan) 2: meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2025 dengan target 100% pada triwulan III tercapai 50%, dengan catatan terdapat 1 (satu) indikator capaian RPD yang realisasinya belum tersedia dikarenakan data menunggu realisasi dari Perangkat Daerah terkait yaitu indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan. Sedangkan 2 (dua) indikator yang telah mencapai target yaitu indikator indeks gini dan indeks kualitas lingkungan hidup, sedangkan 2 (dua) indikator sampai dengan triwulan III belum mencapai target yaitu indikator pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin. Dalam mendukung ketercapaian kinerja Rencana Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang merupakan pengampu dari ketercapain indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan

Daerah tahun 2024-2026 serta melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menghitung ketercapaian indikator daerah.

Rumusan penghitungan capaian kinerja persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

Jumlah indikatorpembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang tercapai pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan X 100%

Keterangan:
Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0

Realisasi indikator kinerja tujuan strategis mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar 50%. Hal tersebut dikarenakan realisasi capaian kinerja diukur sampai dengan triwulan III tahun 2025.
Perkembangan realisasi persentase persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonominan dan pembangunan tahun 2024-2026 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.4 berikut:

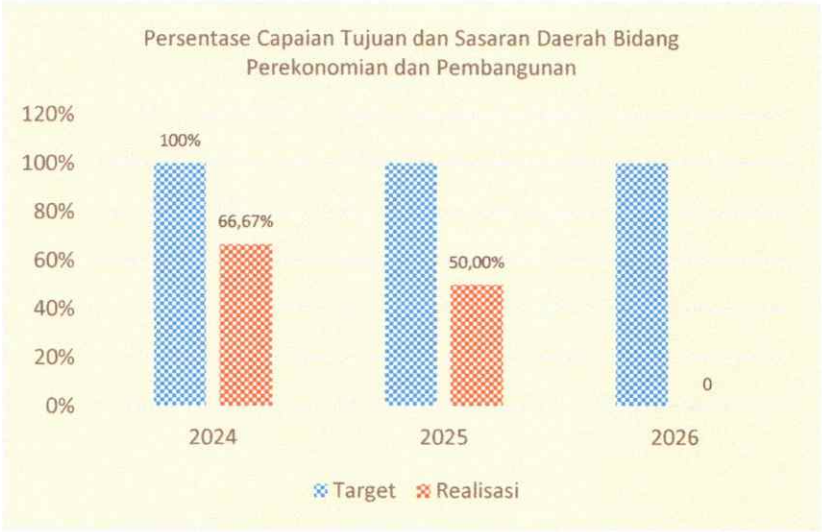

Gambar 3.4 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pada gambar 3.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ketercapaian indikator kinerja persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan target 100% sampai dengan triwulan III Tahun 2025 terealisasi 50%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024-2026 maka capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	50%	50

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah terkait dan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada.
3. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Labotarorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/697/KEP/IV/2025.
4. TPID bersama forkopimda melakukan operasi pasar maupun inspeksi mendadak (sidak) ke distributor bahan pokok secara berkala.
5. Adanya Surat Edaran tentang Larangan Penggunaan LPG 3 kg bagi ASN dan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Terbentuknya Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Koordiansi yang baik antara pemerintah pusat, Provinsi dan Bank Indonesia.
8. Mengikuti rakor terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri pada minggu setiap bulannya.
9. Melaksanakan High Level Marketing dengan provinsi dan BI.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapain kinerja diantaranya:

1. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah belum optimal.
2. Belum maksimalnya laporan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan inflasi.
3. Tindaklajut hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah belum optimal
4. Laporan pelaksanaan operasional dan keuangan BUMD sering terlambat.
5. Inventarisasi data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kurang optimal.

6. Monitoring dan evaluasi ke lapangan kurang maksimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Adanya koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam dan pihak lain
2. Optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah guna mengendalikan inflasi di Kabupaten Belitung bekerjasama dengan APH dan forkopimda.
3. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah melalui rapat pelaksanaan kegiatan secara terjadwal.

2.5 Sasaran Strategis 2.1: Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran yang mendukung tujuan ke-2 dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2024-2026 yaitu meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan target dan realisasi kinerja strategis tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	88,79	88,79	Belum tercapai

Capaian sasaran strategis 2.1: meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2025 tercapai 88,79%

Uraian kinerja atas indikator meningkatnya meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

2.5.1 Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan, yaitu dengan menghitung jumlah persentase ketercapaian indikator tujuan dan sasaran RPD terhadap jumlah indikator tujuan dan sasaran RPD bidang perekonomian dan pembangunan yang tertuang dalam RPD terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu 1) Indeks gini, 2) Pertumbuhan ekonomi, 3) Persentase penduduk miskin, 4) Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan, 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (tujuan RPD) dan 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sasaran RPD), dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%.

Pada tahun 2025, capaian persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang perekonomian dan pembangunan sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar 88,79%, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Nilai Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	88,79%

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Indikator RPD Terkait Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini		0,247-0,252	0,205	117
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,6	4,54	98,70
3	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,3	6,44	98,25
4	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen	65,85	n/a	Belum tersedia
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen	69,26	69,27	109,40

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	%
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	69,26	69,27	109,40

Capaian sasaran strategis meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2025 dengan target 100% sampai dengan triwulan III tercapai 88,79%, dengan 1 (satu) indikator capaian RPD yang belum tersedia datanya yaitu indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan. Sedangkan 2 (dua) indikator yang telah mencapai target yaitu indikator indeks gini dan indeks kualitas lingkungan hidup, sedangkan 2 (dua) indikator belum mencapai target yaitu indikator pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin. Oleh karena itu untuk mendukung ketercapain kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung hanya melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun instansi vertikal.

Rumusan penghitungan capaian kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

Jumlah persentase capaian indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan pada tahun berkenaan / jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan

Realisasi indikator kinerja tujuan strategis mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar 88,79%. Hal tersebut dikarenakan realisasi capaian kinerja diukur sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Perkembangan realisasi persentase persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2024-2026 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.5 berikut:

Gambar 3.5 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pada gambar 3.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ketercapaian indikator kinerja persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan target 100% terealisasi 88,79%, Dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024-2026 maka capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	100%	88,79%	88,79

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah terkait dan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada.
3. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Labotarorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/697/KEP/IV/2025.
4. TPID bersama forkopimda melakukan operasi pasar maupun inspeksi mendadak (sidak) ke distributor bahan pokok secara berkala.

5. Adanya Surat Edaran tentang Larangan Penggunaan LPG 3 kg bagi ASN dan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Terbentuknya Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Koordiansi yang baik antara pemerintah pusat, Provinsi dan Bank Indonesia.
8. Mengikuti rakor terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri pada minggu setiap bulannya.
9. Melaksanakan High Level Marketing dengan provinsi dan BI.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapain kinerja diantaranya:

1. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah belum optimal.
2. Belum maksimalnya laporan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan inflasi.
3. Tindaklajut hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah belum optimal
4. Laporan pelaksanaan operasional dan keuangan BUMD sering terlambat.
5. Inventarisasi data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kurang optimal.
6. Monitoring dan evaluasi ke lapangan kurang maksimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Adanya koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam dan pihak lain
2. Optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah guna mengendalikan inflasi di Kabupaten Belitung bekerjasama dengan APH dan forkopimda.
3. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah melalui rapat pelaksanaan kegiatan secara terjadwal.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program perekonomian dan pembangunan. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Rapat Evaluasi Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi di Daerah

Rakor Perkembangan Situasi Terkini di Daerah dan Pengendalian Inflasi

Seleksi Pemilihan Direktur Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas

Rapat Pembahasan Penilaian Administrasi UPT Lab Lingkungan menjadi BLUD

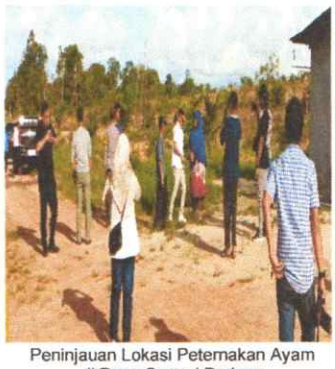

Peninjauan Lokasi Peternakan Ayam di Desa Sungai Padang

Sidak ke Agen dan Pangkalan Gas Tabung Elpigi 3kg dan Operasi Pasar Penyaluran Gas di Kabupaten

Rapat Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sidak ke Pasar Tanjungpandan ketersediaan stok pangan dalam menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Sidak ke Gudang Bulog, Distributor dan Pelabuhan Tanjungpandan terkait Ketersediaan Stok Pangan

Monitoring Bersama Tim Pengendalian Pembangunan Daerah dan APH Terhadap Pelaksanaan Proyek Prioritas

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tentunya didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.22
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	3.1	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**	**persen**	**85**	**76,92**	**90,49**						
		3.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**64,29**	**64,29**						
		3.3	**Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**91,00**	**91,00**						
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	7	63,64	122.915.992	60.422.332	49,16	3	3	100
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	9	64,29	512.984.000	56.052.524	10,93	6	6	100
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	0	0	486.709.275	197.810.010	40,64	21	21	100
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	3	60,00	42.880.313	8.610.500	20,08	1	1	100
								1.165.489.580	**322.895.366**	**27,70**	**31**	**31**	**100**

Pada tabel 3.22 diuraikan bahwa dalam mencapai sasaran terkendalinya perekonomian dan pembangunan Kabupaten Belitung didukung oleh satu program yaitu program perekonomian dan pembangunan dengan sasaran terkendalinya perekonomian dan pembangunan Kabupaten Belitung. Rata-rata capaian sasaran program sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 81,93%, belum mencapai target tahun 2025, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran program didukung dana sebesar Rp.322.895.366,- atau 27,70% dari anggaran sebesar Rp.1.165.489.580,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 4 (empat) indikator dari rencana sebanyak 4 (empat) indikator serta OH sebanyak OH 31 atau 100% dari rencana sebanyak 31 OH terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian perekonomian dan SDA, bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang dan jasa.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 81,93%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 27,70%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 81,93% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:
1. Terkendalinya Kebijakan Pelaksanaan Perekonomian
2. Administrasi Pembangunan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku
3. Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan
4. Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terkendalinya kebijakan pelaksanaan perekonomian dengan indikator dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian sebesar 63,64%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.60.422.332,- atau 49,16% dari anggaran sebesar Rp.122.915.992,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 7 Dokumen atau 63,64% dari rencana sebanyak 11 dokumen, serta OH sebanyak 3 orang atau 100% dari rencana sebanyak 3 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 63,64% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 49,16%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 63,64% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 2** administrasi pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan indikator dokumen administrasi pembangunan terealisasi sebesar 64,29%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.56.052.524,- atau 10,93% dari anggaran sebesar Rp.512.984.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 9 Dokumen atau 64,29% dari rencana sebanyak 14 dokumen, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 64,29 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 10,93%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 64,29% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 3** pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dengan indikator dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi indikator sebesar 0%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.197.810.010,- atau 40,64% dari anggaran sebesar Rp.486.709.275,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 0 dokumen atau 0% dari rencana sebanyak 3 dokumen, serta OH sebanyak 21 orang atau 100% dari rencana sebanyak 21 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 0 % lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 40,64%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 0% % lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 4** terkendalinya pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dengan indikator dokumen hasil kebijakan Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 60%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.8.610.500,- atau 20,08% dari anggaran sebesar Rp.42.880.313,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 3 Dokumen atau 60% dari rencana sebanyak 5 dokumen, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 60% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 20,08%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 60% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

B. Uraian Kinerja Sesuai Dengan Renstra 2025-2029

Kabupaten Belitung telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, Perubahan Perjanjian Kinerja, RKPD Perubahan baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kabupaten Belitung telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja.

Adapun realisasi kinerja Tahun 2025 berdasarkan perubahan perjanjian kinerja yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 diuraikan di bawah ini.

2.1 Sasaran Strategis (tujuan): Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
TUJUAN							
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2,65 (sedang)	n/a	n/a	Belum tersedia

Pencapaian sasaran strategis (tujuan): terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dengan target 2,65 belum tersedia realisasinya dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Uraian kinerja atas indikator kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai berikut:

2.1.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengukuran indikator kinerja diukur dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dimana evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun target tahun 2025 seebsar 2,65 atau kategori sedang.

Pada tahun 2025, capaian Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum tersedia realisasinya dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,65 (sedang)	n/a

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung memiliki peran yang bersifat koordinatif, sehingga untuk memastikan seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dari segala aspek baik aspek yang nantinya akan berdampak pada kualitas perencanaan yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta ketercapaian target kinerja daerah yang dituangkan dalam laporan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada setiap tahunnya pemerintah kabupaten Belitung menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, kemudian dilanjuktan dengan adanya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat penting bagi daerah agar pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan untuk pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah serta mendorong peningkatan kinerja dan kapsitas daerah melalui perbaikan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dari hasil evaluasi maka akan keluar status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan mutu kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam periode satu tahun. Oleh karenanya, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menjadi memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data pada tabel 3.23, dapat dilihat bahwa ketercapaian indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 dengan target 2,65 (sedang) belum tersedia data capaiannya, dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, dalam upaya peningkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Belitung bersinergi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan penyelenggaran pemerintah daerah sebagai suaru fase penting sebagai dasar evaluasi penilaian capaian kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Rumusan penghitungan capaian kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan peringkat, skor dan status kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan melalui proses penilaian kinerja beberapa tahapan. Sedangkan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	Skor Kinerja	Status KInerja
1	0,00 - 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 - 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Realisasi indikator kinerja tujuan strategis belum dapat disandingkan dengan tahun 2024, hal tersebut dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra sehingga indikator ini merupakan indikator baru walaupun kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap tahun.

Perkembangan realisasi indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.6 berikut:

Gambar 3.6 Target dan Realisasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada gambar 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 merupakan tahun pertama Rencana Stategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 2025-2029, dengan capaian indikator status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target 2,65 (sedang) belum tersedia realisasinya, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2025-2029 maka capaian kinerja belum dapat diukur karena menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mendukung ketercapaian peningkatan status kinerja dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Capaian indikator ini tidak dapat diperbadingkan dengan indikator kinerja provinsi/nasional/internasioal dikarenakan indikator diukur dengan membandingkan nilai capaian Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,20%	n/a	n/a

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Melakukan konsultasi dengan Tim Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penjelasan teknis tentang indikator yang berubah atau indikator baru
3. Peningkatan jaringan internet yang sangat mendukung dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Penguatan proses dan mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Fokus pada hasil, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfokus pada hasil nyata, yaitu sejauh mana kinerja Perangkat Daerah memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Kurangnya komitmen pimpinan daerah menjadikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai alat ukur kinerja yang strategis.
3. Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Penguatan sinergi antar Perangkat Daerah
2. Perbaikan kualitas data dan dan dokumen pendukung dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Pemanfaatan pedoman evaluasi (EPPD) dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arahan kebijakan nasional dan prinsip otonomi daerah.
4. Memastikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung data akurat dan tata kelola kolaboratif antar Perangkat Daerah .
5. Optimalisasi proses dan evaluasi internal.
6. Konsultasi dengan tim Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kemendagri untuk mendapatkan penjelasan teknis tentang indikator yang berubah atau baru
7. Menjadikan capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.
8. Memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah yang konsisten menyampaikan data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

2.2 Sasaran Strategis (Sasaran) 1: Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	persen	75 (efektif)	87,83 (efektif)	117,11	Tercapai

Capaian kinerja sasaran strategis 1: implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif terdapat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi sebesar 87,83%.

Uraian kinerja atas indikator implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif sebagai berikut:

2.2.1 Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif

Pengukuran kinerja sasaran diukur untuk mengetahui efektivitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kinerja dikatakan efektif jika pencapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan kesra diimplementasikan. Indikator kinerja program meliputi, 1) Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan, 2) Persentase rekomendasi kebijakan bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti, 3) Persentase rekomendasi kebijakan bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan 4) Persentase rekomendasi kebijakan bagian hukum yang ditetapkan, dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 75% (efektif).

Pada tahun 2025, Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif tercapai 87,83% dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Nilai Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	75% (efektif)	87,83% (efektif)

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan administratif, dimana salah satu tugasnya adalah pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah sehingga dapat mewujudkan dan memastikan pemerintahan berjalan tertib, efisien dan efektif dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum, melalui implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dan kesra. Dalam mewujudkan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra didukung oleh 3 (tiga) bagian yaitu bagian pemerintahan, bagian hukum dan bagian kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bagian.

Terkait pelaksanaan bidang administrasi pemerintahan, telah dilaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait penyelesaian sengketa tanah garapan dan

batas daerah. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan kerjasama telah dilakukan juga fasilitasi dalam penyusunan MoU, PKS dan NPHD guna menjamin terlaksananya kerja sama secara tertib, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Dan dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dilakukan fasilitasi penyusunan laporan penyelengaraan daerah dan penyelenggaraan standar pelayanan minimal untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik.

Sedangkan terkait kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan masyarakat yaitu terfasilitasi pemberian dana hibah rumah ibadah, hibah ormas keagamaan, pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak putus sekolah. Disamping itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan untuk melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum maka dilaksanakan fasilitasi penanganan permasalahan hukum terhadap Pemerintah Daerah dan bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin serta pelaksanaan kegiatan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dilakukan juga fasilitasi penyusunan produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai bentuk implementasi pelaskanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah efektif dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran strategis maka dilakukan pengukuran tingkat efektivitas pencapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri dari 4 (empat) indikator program sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaan sengketa tanah garapan	Persen	100	50	50
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan bagian pemerintahan yang ditindakanjuti	Persen	100	100	100
3		Persentase rekomendasi kebijakan bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	90	91,20	101,33
4		Persentase rekomendasi kebijakan bagian hukum yang ditetapkan	Persen	100	100	100

Pada tabel 3.26 dapat dilihat capaian sasaran strategis implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif dengan indikator persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar 87,83% (efektif) atau sebesar 117,11% dari target yang ditetapkan sebesar 75% (efektif). Hal ini menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra telah efektif dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah. Namun, dari keempat indikator kinerja program terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai yaitu penyelesaian sengketa tanah dikarenakan terdapat 1 (satu) kasus sengketa tanah yang masih belum selesai di tahun 2025 dan akan dilanjutkan untuk difasilitasi penyelesaiannya di tahun 2026, sedangkan ketiga indikator kinerja program telah mencapai target, dimana rekomendasi kebijakan telah ditindaklanjuti atau ditetapkan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Rumusan penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Persentase capaian indikator program Bidang Pemerintahan dan Kesra/ jumlah indikator program Bidang Pemerintahan dan Kesra

Interval efektivitas kebijakan terdiri dari:

a. 1-25 % (Gagal)
b. 26-50% (Tidak Efektif)
c. 51 - 74 % (Kurang Efektif)
d. 75 - 89 % (Efektif)
e. 90 - 100 % (Sangat Efektif)

Perkembangan realisasi Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif tahun 2025-2029 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.7 berikut:

Gambar 3.7 Target dan Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif

Pada gambar 3.7, dapat dilihat capaian implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 dengan target 75% (efektif) tercapai 87,83%.
jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2025-2029 maka capaian kinerja telah mencapai target ditetapkan di akhir renstra. Capaian indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan indkator kinerja provinsi/nasional/internasional dikarenakan indikator kinerja diukur melalui ketercapain kinerja program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian.
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif	83%	87,83%	103,33

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Melakukan fasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah garapan yang diadukan oleh masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah maupun stakeholder terkait dalam pelaksanaan program bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat
3. Penerapan prinsip-prinsip tata Kelola Pemerintahan yang baik.
4. Terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung.
5. Penguatan kerangka regulasi dan hukum dimana harus memastikan adanya Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama yang jelas, mengikat, dan tidak tumpeng tindih. Kerangka hukum yang kuat memberikan kepastian dan landasan yang sah bagi pelaksanaan kerja sama.
6. Transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap proses kerja sama dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
7. Pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Belitung meluncurkan aplikasi *"e-pekasam"* (perjanjian kerja sama) diharapkan dapat meningkatkan layanan kerja sama dan mempermudah layanan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat.

8. Melaksanakan rapat teknis bulanan/per triwulan untuk mengetahui sejauhmana proses capaian kinerja sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan untuk mengetahui secara dini faktor-faktor penghambat yang mungkin terjdai dalam upaya pencapaian kinerja.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Tidak adanya Dinas yang mengurus urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten Belitung selain di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, seharusnya ada dinas khusus terkait yang dapat mengampu urusan pertanahan sehingga data dan informasi bisa berjalan efektif. Oleh karena itu, ketiadaan dinas khusus yang mengampu urusan pertanahan di tingkat daerah dapat menimbulkan beberapa konsekuensi konseptual dan praktis. Jika hanya berada di bagian pemerintahan, fungsi-fungsi krusial tersebut berisiko tidak berjalan optimal.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pada masing-masing bagian.
3. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam merealisasikan rencana kerja sama.
4. Keterlambatan terkait pembahasan perubahan Peraturan Bupati terkait beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan.
5. Terdapat satu yayasan / lembaga penerima hibah tahun 2025 yang tidak mencairkan dana hibah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada yayasan/lembaga tersebut.
6. Optimalisasi koordinasi leading sektor pendukung kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja pada bagian kesejahteraan rakyat belum berjalan dengan baik
7. Belum adanya ruangan khusus untuk menerima konsultasi dalam permasalah hukum.
8. Penyampaian rancangan produk hukum daerah dari Perangkat Daerah Pemrakarsa melebihi waktu tanggal penyampaian

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian kinerja sehingga kegiatan bisa berjalan dengan efektif dan lebih optimal.
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam rangka optimalisisi lebih lanjut terkait pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan.
3. Mekanisme pengawasan yang efektif dan melibatkan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi publik dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintah.
4. Penyusunan payung hukum yang jelas, pastikan setiap kerja sama didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan yang rinci dan mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Peningkatakan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja.
6. Meningkatkan koordinasi antar pihak baik dalam rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
7. Melibatkan pimpinan tinggi dalam tahap awal perencanaan kerja sama.
8. Memaksimalkan aggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan yang ada.
9. Mengoptimalisasikan keberadaan standar oprasional prosedur (SOP) sebagai penunjang kinerja.
10. Penyediaan ruangan yang komprehensif dalam melaksanakan konsultasi permasalahan hukum.
11. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi produk hukum daerah

Dalam mendukung ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Koordinasi Terkait Lahan TPA Milik Pemkab Belitung

Meninjau Lokasi Terkait Gugatan Lahan

Rapat permasalahan lahan IUP PT Timah

Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Lahan Kawasan Industri Suge

Rapat Koordinasi Forum Koordinasi

Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama Antara Komunitas Air Selumar Dengan Pemkab Belitung

Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pariwisata Palembang Dengan Pemkab Belitung

Rapat Pembahasan Rencana Kerja BPJS Dengan Pemkab Belitung

Rapat Terkait Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Monev Rumah Ibadah

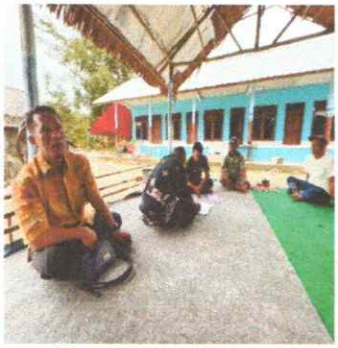

Monev Organisasi Keagamaan

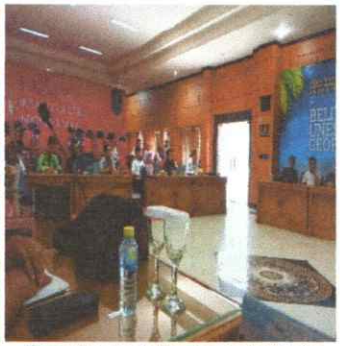

Rapat Persiapan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

Rapat Verifikasi Usulan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin

Rapat Pembahasan Jawaban Gugatan Perkara Nomor:8/G/2025/PTUN-PGP

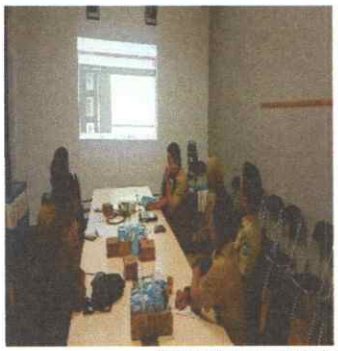

Rapat Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung B12

Rapat Harmonisasi Raperkada dengan Kanwil Hukum

Rapat Pembahasan Raperda dengan DPRD

Rapat Pembahasan Raperkada dengan Perangkat Daerah

Rapat Evaluasi Pelaporan JDIH

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.27
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**1.1**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**Persen**	**100**	**50,00**	**50**						
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	1.1.1	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	2	1	50	23.322.800	21.335.881	91,48	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**50**	**23.322.800**	**21.335.881**	91,48	**1**	**1**	
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**2.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		2.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		2.3	**Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	7	100,00	626.698.600	538.056.014	85,86	4	4	100
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	5	100	10.731.888.350	10.470.408.748	97,56	8	8	100
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	708	1043	147,32	381.257.300	353.024.744	92,59	11	11	100
2.4	Teraksananya Kerjasama Daerah	2.4.1	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	2	100	16.653.300	14.880.130	89,35	2	2	100
								11.756.497.550	**11.376.369.636**	**96,77**	**25**	**25**	**100**

Pada tabel 3.27 dijabarkan bahwa dalam mencapai sasaran Implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif didukung oleh 2 (dua) Program dengan sasaran:

1. Terwujudnya Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Rata-rata capaian **sasaran program 1** terwujudnya proses penyelesaian tanah garapan dengan indikator persentase penyelesaian sengketa tanah garapan terealisasi 50%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran program didukung dengan dana sebesar Rp. 21.335.881,- atau 91,48% dari anggaran sebesar Rp. 23.322.800,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) indikator dari rencana sebanyak 1 (satu) indikator serta OH sebanyak OH 1 atau 100% dari rencana sebanyak 1 OH yang dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50%, lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 91,48%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terselenggaranya fasilitasi penyelesaian mediasi sengketa tanah garapan dengan indikator dokumen berita acara fasilitasi penyelesaian mediasi sengketa tanah garapan sebesar 1 dokumen atau 50%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp. 21.335.881,- atau 91,48% dari anggaran sebesar Rp. 23.322.800,- dan indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 1 berita acara dari rencana sebanyak 2 berita acara, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih kecil dari pada penggunaan dana sebesar 91,48%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 50% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran program 2** meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100%, dan telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian ini didukung dengan dana sebesar Rp.11.376.396.636,- atau 96,77 % dari anggaran sebesar Rp.11.756.497.550,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 4 (empat) indikator dari rencana sebanyak 4 (empat) indikator serta OH sebanyak OH 25 atau 100% dari rencana sebanyak 25 OH yang dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih tinggi dari pada capaian penggunaan dana sebesar 96,77%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di dukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang hukum
4. Terlaksananya kerja sama daerah

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator dokumen administrasi tata pemerintahan sebesar 100%, dan telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.538.056.014,- atau 85,86% dari anggaran sebesar Rp.626.698.600,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 7 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 7 dokumen, serta OH sebanyak 4 orang atau 100% dari rencana sebanyak 4 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 85,86%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 2** pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dengan indikator dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar 100%, dan telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.10.470.408.748,- atau 97,56% dari anggaran sebesar Rp.10.731.888.350,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 5 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 5 dokumen, serta OH sebanyak 8 orang atau 100% dari rencana sebanyak 8 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih tinggi dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,56%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 3** pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang hukum dengan indikator produk hukum daerah yang terhamonisasi sebesar 147,32%, dan telah melampaui target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.353.024.744,- atau 92,59% dari anggaran sebesar Rp.381.257.300,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 1.043 dokumen atau 147,32% dari rencana sebesar 708 dokumen, serta OH sebanyak 11 orang atau 100% dari rencana sebanyak 11 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 147,32% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 92,59%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 147,32% lebih tinggi dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 4** terlaksananya kerjasama daerah dengan indikator dokumen kerjasama daerah sebesar 100%, dan telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.14.880.130,- atau 89,35% dari anggaran sebesar Rp.16.653.300,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 2 dokumen atau 100% dari rencana sebesar 2 dokumen, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 89,35%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Analisis penggunaan sumber daya dan anggaran
Pada uraian di atas, dapat dianalisa bahwa capaian kinerja program telah menunjukkan efisiensi baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari anggaran dengan target capaian kinerja program sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan oleh dari 3 (tiga) bagian dan telah mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bagian-bagian sehingga dapat mencapai kinerja yang ditargetkan. Seperti dalam pelaksanaan urusan pertanahan dimana dilaksanakan oleh satu pegawai yang juga melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, selain itu pada bagian hukum dengan dua orang JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan telah dapat mengoptimalkan

kinerja terkait produk hukum daerah sistematis, terencana dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah. Dari segi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 11.756.497.550,- terealisasi sebesar Rp. 11.376.369.636 atau 96,77%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah dipergunakan secara optimal dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.380.127.914,- atau 3,23%. Secara umum efisiensi anggaran berasal dari belanja makanan dan minuman rapat dan belanja barang cetakan dan cover yang penggunaannya di sesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2.3 Sasaran Strategis (Sasaran) 2: Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Yang Efektif

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembanguan yang efektif	persen	75 (efektif)	98,68 (sangat efektif)	131,57	Tercapai

Capaian kinerja sasaran strategis 1: implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi sebesar 98,68%.

Uraian kinerja atas indikator implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif sebagai berikut:

2.3.1 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Yang Efektif

Pengukuran kinerja sasaran diukur untuk mengetahui efektivitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan. Kinerja dikatakan efektif jika pencapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan pembangunan diimplementasikan. Indikator kinerja program meliputi, 1) Persentase rekomendasi kebijakan bagian perekonomian dan SDA yang ditndaklanjuti, 2) Persentase kebijakan program pembangunan daerah yang di evaluasi, 3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dan 4) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan, dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 75% (efektif).

Pada tahun 2025, Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif tercapai 98,68% dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.29
Realisasi Nilai Persentase Kebijakan Bidang Perekonomain dan Pembangunan Yang Efektif Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembanguann yang efektif	75% (efektif)	98,68% (sangat efektif)

Pada struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung memiliki 3 (tiga) asisten yang terbagi dalam 9 (sembilan) bagian dengan mitra kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang/bagian masing-masing yang telah diatur dalam Peraturan Bupati terkait tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran yang bersifat koordinatif, memegang peran sebagai mesin penggerak dalam memastikan ketercapaian kinerja melalui kebijakan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bagian yaitu bagian perekonomian dan sumber daya alam, bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang dan jasa.

Terkait pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dilakukan melalui pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi terkait pelaksanaan BUMD dan BLUD, pengendalian inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan tanggung jawab sosial, lingkungan dan perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pengawasan terhadap ekonomi mikro maupaun sumber daya alam (pertanian, perikanan peternakan, sumber daya mineral, dan lainnya). Selain itu, pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pembangunan dilakukan melalui fasilitasi penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan terutama berkaitan dengan program/proyek prioritas daerah serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan fasilitasi, koordinasi, maupun bimtek /sosialiasi/ pendampingan dan penetapan kebijakan baik melalui surat edaran maupun surat keputusan kepala daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa yang secara garis besar dilaksanakan dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6, pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dan pencatatan swakelola dan non tender serta penilaian kinerja penyedia. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah efektif dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung ketercapaian pembangunan daerah, maka perlu diketahui tingkat efektivitas pencapaain

indikator kinerja program yang mendukung implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan bagian perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
2		Persentase kebijakan progam pembangunan daerah yang di evaluasi	Persen	100	100	100
3		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Nilai	80	75,77	94,71
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaan dan evauasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100

Pada tabel 3.29 dapat dilihat capaian sasaran strategis implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif dengan indikator persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar 98,68% (sangat efektif) atau sebesar 131,57% dari target yang ditetapkan sebesar 75% (efektif). Hal ini menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan telah efektif atau berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap bagian.

Berdasarkan data capaian kinerja program perekonomian dan pembangunan terdapat capaian kinerja program yang belum mencapai target yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa sebagaimana hasil evaluasi terkait nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dileuarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana terdapat komponen yang belum dicapai secara optimal seperti kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut agar hasil ITKP Kabupaten Belitung dapat meningkat dan dapat mendukung penigkatan kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung.

Rumusan penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perekonomian Dan Pembangunan / Jumlah Indikator Program Bidang Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

Interval efektivitas kebijakan terdiri dari:

a. 1-25 % (Gagal)
b. 26-50% (Tidak Efektif)
c. 51 - 74 % (Kurang Efektif)
d. 75 - 89 % (Efektif)
e. 90 - 100 % (Sangat Efektif)

Perkembangan realisasi Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif tahun 2025-2029 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.8 berikut:

Gambar 3.8 Target Dan Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Yang Efektif

Pada gambar 3.8, dapat dilihat capaian implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 dengan target 75% (efektif) tercapai 75% (efektif), jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2025-2029 maka capaian kinerja telah mencapai target ditetapkan di akhir renstra. Capaian indikator ini tidak dapat diperbadingkan dengan indikator kinerja provinsi/nasional/internasioal dikarenakan indikator kinerja diukur melalui ketercapain kinerja program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Implementasi kebijakan bidang	Persentase kebijakan bidang	83%	98,68%	118,89

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
perekonomian dan pembangunan yang efektif	perekonomian dan pembanguan yang efektif			

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
2. Terpilihnya Direktur PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia (Perseroda) Periode 2025-2030.
3. Terpilihnya Direktur Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas Periode 2025-2030.
4. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Labotarorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/697/KEP/IV/2025.
5. Melakukan operasi pasar beras SPHP dengan Bulog, Gerakan Pangan Murah dengan Bapanas, Pasar Tani dan Bazar Ikan.
6. Pelaksanaan monitoring dan inspeksi mendadak penyaluran Tabung Gas Elpigi 3 Kg ke agen dan pangkalan.
7. Adanya Surat Edaran tentang larangan penggunaan LPG 3 kg bagi ASN dan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Pelaksanaan Inspeksi mendadak ke distributor secara berkala.
9. Koordinasi yang baik dengan para Direktur BUMD di Kabupaten Belitung.
10. Terbentuknya Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
11. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Regulasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Bank Indonesia.
12. Koordinasi secara intens dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung terkait pelaksanaan kegiatan
13. Koordinasi secara intens dengan Bapperida dan BPKAD terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
14. Koordinasi secara intens dengan Bagian Organisasi Setda dan Bapperida terkait dengan penyusunan dokumen evaluasi kinerja.
15. Adanya Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

16. Tersedianya aplikasi *si pelempang* sebagai sumber data dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi anggaran dan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan proyek prioritas.
17. Sinergi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung khususnya Bidang Akuntansi berjalan dengan baik, dengan pemanfaatan data realisasi keuangan sebagai parameter hasil input Perangkat Daerah.
18. Pelaksanaan monitoring terhadap Perangkat Daerah yang masih memiliki permasalahan dalam penyerapan anggaran telah memberikan kemajuan positif terhadap kemajuan penyerapan anggaran
19. Tersusunnya SK Bupati Belitung tentang Proyek Prioritas Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025.
20. Koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan proyek prioritas sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
21. Adanya kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
22. Asistensi/Pembinaan/Pendampingan baik kepada pelaku pengadaan (penyedia atau non penyedia) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (termasuk didalamnya penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa).
23. Mengadakan kegiatan workshop/bimbingan teknis/sosialisasi/ataupun acara sejenis lainnya terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Termasuk didalamnya penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa).
24. Memaksimalkan indikator kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa.
25. Tersedianya tim clearing house yang dapat digunakan oleh non pelaku pengadaan untuk pengaduan/permasalahan Pengadaan Barang dan jasa

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurangnya SDM pada Bagian Perekonomian dan SDA yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan monev di Bagian Perekonomian dan SDA menjadi terhambat dan kurang optimal.
2. Koordinasi dengan perangkat Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah kurang optimal.
3. Inventarisasi data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kurang optimal.
4. Laporan pelaksanaan operasional dan Keuangan BUMD sering terlambat.

5. Adanya ketidakpatuhan dari PPTK dan PPTK di lingkunagn Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan rencana aksi pelaksanaan kegiatan.
6. Belum tertibnya PPK dan PPTK dalam melaksanakan target kinerja sub kegiatan masing-masing bagian.
7. Sering berubahnya regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan.
8. Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum tepat waktu dalam melakukan input ke dalam aplikasi *si pelempang*
9. Perubahan regulasi pusat yang dinamis (adanya regulasi baru) sehingga memerlukan waktu adaptasi untuk memahami aturan terbaru agar kemudian dapat diproses tindak lanjut menjadi kebijakan ditingkat daerah
10. Lambatnya respon kendala dalam penggunaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa oleh LKPP RI (dikarenakan digunakan seluruh Indonesia).
11. Keterisian formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PPBJ) belum sesuai dengan surat rekomendasi Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP RI
12. Beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang tepat dalam menentukan metode pemilihan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga antara perencanaan dengan pelaksanaan berbeda (mempengaruhi skor SiRUP yang didapat).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Optimalisasi Pembinaan BUMD dan BLUD
2. Memaksimalkan koordinasi Forum TJSLP dengan Perusahaan/BUMN untuk secara rutin menyampaiakan laporan pelaksanaan CSR/TJSLP
3. Optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Belitung dengan APH dan Forkopimda
4. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini PPK, PPTK, Bapperida, BPKAD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belitung.
6. Meningkatkan monitoring terhadap Perangkat Daerah yang masih terlambat dalam melaukan input data realisasi fisik dan keuangan ke dalam aplikasi *si pelempang* serta terhadap Perangkat Daerah yang memiliki serapan yang rendah atau tidak sesuai dengan terget yang ditetapkan dalam setiap bulannya, sehingga dapat diketahui secara dini penyebab terlambatnya input data dan penyerapan anggaran.

7. Mengusulkan kepada pimpinan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menugaskan operator khusus pelaporan capaian fisik dan keuangan pada aplikasi.
8. Meningkatkan fungsi aplikasi *si pelempang* dalam mengakomosir data yang diperlukan tetapi belum tersedia pada aplikasi *si pelempang.*
9. Menetapkan lebih awal dengan keputusan kepala daerah mengenai kegiatan prioritas daerah, agar dapat melaksanakan kegiatan pengendalian program pembangunan terhadap Perangkat Daerah pengampu kegiatan.
10. Berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait terutama kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Bantuan Provinsi (DABA) terkait kendala yang ada untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, tepat mutu dan tepat waktu.
11. Meningkatkan koordinasi dengan Bapperida Kabupaten Belitung terkait pelaksanaan pengendalian program pembangunan.
12. Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (terutama penggunaan katalog elektronik versi 6).
13. Memaksimalkan layanan dan dukungan (helpdesk/trainer) LPSE untuk membantu perangkat daerah ataupun penyedia melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
14. Meningkatkan kapasitas SDM yang tersedia melalui diklat/bimtek/sosialisasi/dan lainnya dalam bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa (termasuk di dalamnya penggunaan sistem informasi).
15. Memaksimalkan indikator pemanfaatan sistem pengadaan.
16. Terus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program perekonomian dan pembangunan. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Rapat Evaluasi Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi di Daerah

Rapat Evaluasi Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi di Daerah

Seleksi Pemilihan Direktur Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas

Rapat Pembahasan Penilaian Administrasi UPT Lab Lingkungan Menjadi BLUD

Peninjauan Lokasi Peternakan Ayam di Desa Sungai Padang

Sidak ke Agen dan Pangkalan Gas Tabung Elpigi 3kg dan Operasi Pasar Penyaluran Gas di Kabupaten

Rapat Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sidak Ke Pasar Tanjungpandan Ketersediaan Stok Pangan

Sidak ke Gudang Bulog, Distributor dan Pelabuhan Tanjungpandan terkait Ketersediaan Stok Pangan Menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Monitoring Bersama Tim Pengendalian Pembangunan Daerah dan APH Terhadap Pelaksanaan Proyek Prioritas

Monitoring Terhadap Realisasi Fisik dan Keuangan

Pendampingan Pembuatan Akun INAPROC Non Penyedia ke OPD

Workshop Transaksi Pembayaran Katalog Elektronik versi 6 (Bendahara

Penarikan Data Rencana Kerja Anggaran Daerah (APBDP TA 2025) dari Aplikasi SIPD RI ke Aplikasi SiRUP

Rapat Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Transaksi pada e-Katalog Versi 6 Tahun 2025 di Kantor UKPBJ Kab. Belitung

Penerimaan Kunjungan Kerja LPSE Prov. Kep. Babel ke UKPBJ Kab. Belitung

Rapat Pembahasan Kelengkapan Dokumen untuk MCSP KPK Area Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ke OPD

Asistensi yang dilakukan Anggota Tim UKPBJ Kab. Belitung dan Tata Cara Registrasi Akun INAPROC

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.30
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Perekonomian dan Pembanguan Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**1.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**	**persen**	**85**	**85**	**100**						
		1.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		1.3	**Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	100,00	211.893.100	136.552.513	64,44	3	3	100
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	14	100	98.344.800	84.286.124	85,70	6	6	100
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	100	460.098.475	312.641.233	67,95	24	24	100
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	5	100	25.180.400	13.849.800	55,00	1	1	100
								795.516.775	**547.329.670**	**68,80**	**34**	**34**	100

Pada tabel 3.30 diuraikan bahwa dalam mencapai sasaran Implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif didukung oleh satu program yaitu program perekonomian dan pembangunan dengan sasaran terkendalinya perekonomian dan pembangunan Kabupaten Belitung. Rata-rata capaian sasaran program tahun 2025 sebesar 100%, sudah mencapai target tahun 2025, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran program didukung dana sebesar Rp.547.329.670,- atau 68,80% dari anggaran sebesar Rp.795.516.775,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 4 (empat) indikator dari rencana sebanyak 4 (empat) indikator serta OH sebanyak OH 34 atau 100% dari rencana sebanyak 34 OH terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian perekonomian dan SDA, bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang dan jasa.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 68,80%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:
1. Terkendalinya Kebijakan Pelaksanaan Perekonomian
2. Administrasi Pembangunan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku
3. Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan
4. Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terkendalinya kebijakan pelaksanaan perekonomian dengan indikator dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.136.552.513,- atau 64,44% dari anggaran sebesar Rp.211.893.100,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 11 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 11 dokumen, serta OH sebanyak 3 orang atau 100% dari rencana sebanyak 3 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 64,44%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 2** administrasi pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan indikator dokumen administrasi pembangunan terealisasi sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.84.266.124,- atau 85,70% dari anggaran sebesar Rp.98.344.800,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 14 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 14 dokumen, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 85,70%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 3** pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dengan indikator dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi indikator sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.312.261.233,- atau 67,95% dari anggaran sebesar Rp.460.098.475,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 3 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 3 dokumen, serta OH sebanyak 24 orang atau 100% dari rencana sebanyak 24 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 67,95%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 4** terkendalinya pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dengan indikator dokumen hasil kebijakan Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.13.849.800,- atau 55,00% dari anggaran sebesar Rp.25.180.400,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 5 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 5 dokumen, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 55,00%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Analisis penggunaan sumber daya dan anggaran

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa capaian kinerja program telah menunjukkan efisiensi baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari anggaran dengan target capaian kinerja program sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan dilaksanakan oleh dari 3 (tiga) bagian dan telah mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bagian-bagian sehingga dapat mencapai kinerja yang ditargetkan, meskipun terdapat bagian yang masih kekurangan pegawai, seperti pada bagian Perekonomian dan SDA, dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang telah merealisasikan output kegiatan sesuai target. Sedangkan capaian anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 795.516.775,- terealisasi sebesar Rp.547.329.670. atau 68,80%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.212.187.105,- atau 31,2% yang berasal dari diantaranya:

- Belanja makanan dan minuman, sewa kendaraan yang dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggota Tim Clearing House Kabupaten Belitung. Dimana honorarium tersebut bersifat insidentil yang diberikan kepada Anggota Tim Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung yang berasal dari unsur diluar pemerintah Kabupaten Belitung Ketika adanya pengaduan/permasalahan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan penanganan/penyelesaian dari Tim Clearing House Kabupaten Belitung. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengaduan permasalah Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Belitung yang memerlukan penanganan/penyelesaian dari anggota Tim Clearing House Kabupaten Belitung yang berasal dari unsur diluar instansi Pemerintah Kabupaten Belitung sehingga honorarium tidak direalisasikan.
- Pada perencanaan kegiatan terdapat pemilihan 3 direktur BUMD, namun yang terealisasi seleksi pada 2 direktur BUMD yaitu Direktur Persiroda BUP. Tanjung Batu dan Direktur Perumda Tirta Batu Mentas, sedangkan untuk seleksi Direktur Persiroda Belitong Mandiri dengan kebijakan Bupati masih ditetapkan dengan direktur lama, tidak dilaksanakan seleksi pemilihan direktur baru, sehingga mengurangi anggaran sebesar 36,68%.
- Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung telah mengoptimalkan penggunaan surat menyurat secara online, dan juga untuk pengiriman laporan/dokumen dilakukan secara online/menggunakan aplikasi, sehingga penggunaan kertas dan belanja cover dapat diminimalisir.
- Pelaksanaan Diklat/Bimbingan Teknis/Workshop diikuti oleh ASN dilakukan secara online.

2.4 Sasaran Strategis (Sasaran) 3: Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum Yang Efektif

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	persen	75 (efektif)	98,09 (sangat efektif)	130,79	Tercapai

Capaian kinerja sasaran strategis 1: implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif terdapat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi sebesar 98,09% (sangat efektif).

Uraian kinerja atas indikator implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif sebagai berikut:

2.4.1 Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum Rakyat Yang Efektif

Pengukuran kinerja sasaran diukur untuk mengetahui efektivitas kebijakan bidang administrasi umum. Kinerja dikatakan efektif jika pencapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan pembangunan diimplementasikan. Indikator kinerja program meliputi, 1) Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan, 2) Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah, 3) Survey kepuasan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah, 4) Survey kepuasan pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah, 5) Persentase pelayanan administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, 6) Persentase rekomendasi kebijakan bagian organisasi yang dievaluasi dan ditindaklanjuti dan 7) Persentase pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 75% (efektif).

Pada tahun 2025, Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif tercapai 98,09% (sangat efektif) dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.32
Realisasi Nilai Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum Yang Efektif Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	75% (efektif)	98,09 (sangat efektif)

Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berada di bawah asisten adminsitrasi umum yang membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan, penyusunan dan

pengoordinasian kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang terdiri 3 (tiga) bagian yaitu bagian umum, bagian organisasi dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan.

Bidang administrasi umum merupakan bidang yang melaksanakan tugas terkait pelayanan internal kepada pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya seperti ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan diklat untuk menunjang kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu melakukan fasilitasi pengoordinasian, dan pendampingan kegiatan pimpinan daerah secara optimal, baik terhadap kegiatan yang dihadiri langsung oleh pimpinan daerah maupun yang dilaksanakan melalui mekanisme penugasan atau perwakilan. Sementara itu terkait pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta reformasi birokrasi dituangkan dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, kematangan organisasi, profi kelembagaan organisasi penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati terkait kelembagaan, seperti Peraturan Bupati Belitung tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan dokumen analisis jabatan terdiri dari dokumentasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, kelas jabatan dan pembahasan tunjangan perbaikan penghasilan. Selain itu dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan tata laksana, pada bagian Organisasi melaksankan fasilitasi dan evaluasi standar pelayanan perangkat daerah, peta proses bisnis, budaya kerja dan tata naskah dinas serta kompetensi inovasi pelayanan publik dan penilaian Ombudsman terkait pelayanan publik serta rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sehingga untuk mengetahui apakah kebijakan bidang administrasi umum yang telah dilaksanakan mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran strategis, maka perlu diketahui tingkat efektivitas pencapaian indikator kinerja program bidang administrasi umum sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan	Persen	100	100	100
2		Indeks profesonalitas ASN perangkat daerah	Nilai	79,80	74,95	93,92
3		Nilai Survei Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi	Nilai	85	82,52	97,08

No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	%
		Perkantoran Perangkat Daerah				
4		Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Nilai	85	81,3	95,65
5		Persentase pelayanan adminstrasi Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persen	100	100	100
6		Persentase rekomendasi kebijakan bagian organisasi yang dievauasi dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
7		Persentase pelakanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	100	100

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian sasaran strategis implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif dengan indikator persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar 98,09% (sangat efektif) atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75% (efektif).

Berdasarkan data capaian kinerja program terdapat 3 (tiga) capaian kinerja program yang belum mencapai target yaitu Indeks profesonalitas ASN Perangkat Daerah, nilai survei kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah dan nilai survei kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah yang masih di bawah target dan belum sesuai ekspektasi. Sehingga menjadi bahan evaluasi kinerja ditahun mendatang agar dapat terealisasi sesuai target melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Rumusan penghitungan capaian indikator sebagai berikut:

Persentase Capaian Indikator Program Bidang Administrasi Umum / Jumlah Indikator Program Bidang Administrasi Umum

Interval efektivitas kebijakan terdiri dari:

a. 1-25 % (Gagal)
b. 26-50% (Tidak Efektif)
c. 51 - 74 % (Kurang Efektif)
d. 75 - 89 % (Efektif)
e. 90 - 100 % (Sangat Efektif)

Perkembangan realisasi Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif tahun 2025-2029 dan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target 2025 disajikan pada gambar 3.9 berikut:

Gambar 3.9 Target Dan Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum Yang Efektif

Pada gambar 3.9, dapat dilihat capaian implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 dengan target 75% (efektif) tercapai 98,09% (sangat efektif), jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2025-2029 maka capaian kinerja telah mencapai target ditetapkan di akhir renstra. Dan capaian indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja provinsi/nasional/internasional dikarenakan indikator kinerja diukur melalui ketercapain kinerja program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif	83% (efektif)	98,09 (sangat efektif)	118,18

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan
2. Sinkronisasi perencanaan pengembangan SDM ASN dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah
3. Koordinasi antarbagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran maupun dalam rangka mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur.
4. Penyesuaian dan penyempurnaan prosedur pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan ketentuan yang berlaku.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan serta pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
6. 5 (lima) agenda besar dalam gerakan Reformasi Birokrasi yaitu percepatan reformasi birokrasi, island of integrity, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan.
7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus
8. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait kemungkinan penyediaan sistem yang terintegrasi pelaporan capaian kinerja.
9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Penyediaan aplikasi Survey Kepuasan Msyarakat untuk kemudahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, serta monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah yang intensif dilaksanakan secara berkelanjutan.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Pemanfaatan aplikasi SIPD RI yang belum berjalan secara optimal, ditandai dengan sering terjadinya gangguan sistem dan lambatnya akses, sehingga berdampak pada keterlambatan proses input dan pengolahan data keuangan.
2. Masih adanya ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional maupun teknis, yang disebabkan keterbatasan kuota diklat, penyesuaian kebutuhan organisasi, serta prioritas pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Beban tugas kedinasan yang cukup tinggi sehingga membatasi kesempatan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan secara menyeluruh pada seluruh unit terkait.
5. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana aparatur secara optimal.
6. Tingginya intensitas dan kompleksitas kegiatan pimpinan daerah, namun sumber daya manusia terbatas.
7. Perangkat Daerah belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam membuat standar pelayanan.
8. Perangkat Daerah Perangkat Daerah belum memperbaharui standar pelayanan dan SOP.
9. Belum ditetapkannya Grand desain RB Nasional 2025-2045 dan Roadmap RB Nasional 2025-2029.
10. Belum keluarnya petunjuk teknis tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
11. Tidak ada laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara periode.
12. Kurang respon dan enggannya penyusun laporan kinerja Perangkat Daerah untuk menyesuaikan laporan kinerja perangkat daerah dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan berita acara hasil verifikasi oleh tim laporan kinerja
13. Sistem perencanaan, anggaran, pelaporan dan evaluasi belum terintergrasi, sehingga pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat optimal.
14. Kendala server pada aplikasi *e-sakip* Belitung menjadi penghambat dalam pengintegrasiian data SAKIP dari *e monevpro*.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2025 akan dilakukan:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD RI yang tersedia, serta menyiapkan alternatif penyusunan laporan keuangan secara manual sebagai langkah antisipatif apabila terjadi gangguan sistem
2. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan diklat fungsional dan teknis sesuai kebutuhan jabatan.

3. Mendorong peningkatan partisipasi ASN dalam pendidikan formal dan nonformal melalui perencanaan pengembangan SDM yang lebih terarah.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi antar bagian dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pelayanan.
5. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tindak lanjut hasil survei guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan.
7. Optimalisasi penganggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana prioritas.
8. Penyempurnaan perencanaan dan penjadwalan kegiatan pelayanan administrasi pimpinan secara lebih terstruktur dan fleksibel.
9. Membuat edaran/himbauan agar perangkat daerah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam membuat/merevisi Standar Pelayanan.
10. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam membuat/merevisi SOP yang ada.
11. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2026 dan monitoring pelaksanaan RB tahun 2026.
12. Optimalisasi penggunaan aplikasi survei kepuasan masyarakat.
13. Monitoring pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM);
14. Mengharuskan perangkat daerah melaporkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) per triwulan.
15. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan capaian kinerja serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk penyediaan sistem yang terintegrasi guna mempermudah pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut

Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja

Rapat Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Aksi RB

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Rapim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Verifikasi Lapangan TOP 10 Kompetensi Inovasi Pelayanan

Rapat Penyusunan Peta Jabatan OPD

Audensi Pelaksanaan Rusi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kep. Babel

Monev Pelaksanaan SKM ke OPD

Rapat Pembahasan TPP Pegawai

Verifikasi Lapangan TOP 10 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

Audensi Pelaksanaan Rusi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kep. Babel

Bupati Menghadiri pelaksanaan P4GN

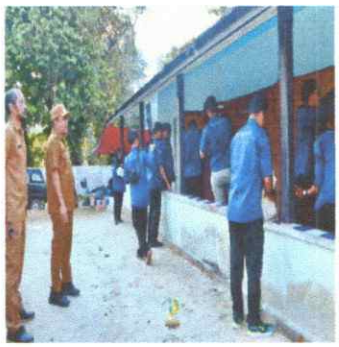

Wabup Tinjau Pelayanan Publik Perumda Tirta Batu Mentas

Rapat Bulanan Pelaksanaan Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.33
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program Bidang Administrasi Umum Tahun 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**1.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		1.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**71**	**74,95**	**105,56**						
		1.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		1.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		1.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	1.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	100	43.071.400	42.169.300	97,91	2	2	100
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	1.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	20.797.043.012	17.925.953.148	86,19	6	6	100
1.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	1.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	20	17	85	210.000.000	78.764.606	37,51	1	1	100
1.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	3.288.707.449	3.114.438.679	94,70	9	9	100
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	1.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	2	2	100	10.000.000	9.500.000	95,00	2	2	100
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	100	100	2.676.443.200	2.231.901.283	83,39	29	29	100
1.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	6	100	3.552.112.000	3.288.084.507	92,57	6	6	100
1.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	100	1.741.413.794	1.517.483.659	87,14	1	1	100

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	100	1.797.793.200	1.655.093.940	92,06	2	2	100
1.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	1.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	100	208.482.400	150.967.564	72,41	8	8	100
1.11	Terlaksananya Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	1.11.1	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	12	100	1.571.621.982	1.478.050.989	94,05	17	17	100
								35.896.688.437	**31.492.407.675**	**87,73**	**83**	**83**	100

Pada tabel 3.33 diuraikan bahwa dalam mencapai sasaran Implementasi kebijakan bidang administrasi umum yang efektif didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Rata-rata capaian sasaran program tahun 2025 sebesar 101,11% belum mencapai target realisasi capaian, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran program didukung dana sebesar Rp.31.492.407.675,- atau 87,73% dari anggaran sebesar Rp.35.896.688.437,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 11 (sebelas) indikator dari rencana sebanyak 11 (sebelas) indikator serta OH sebanyak OH 83 atau 100% dari rencana sebanyak 83 OH terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian umum, bagian organisasi dan bagian prokopim.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program telah tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output tercapai 101,11% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 87,73%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 101,11% lebih tinggi capaian penggunaan OH sebesar 100%

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
2. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP
3. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku
4. Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah
5. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
10. Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan
11. Terlaksananya keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dengan indikator dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi sebesar 100% dan telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan

didukung dengan dana Rp. 42.169.300,- atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp. 48.071.400,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 10 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 10 dokumen, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % dan capaian penggunaan dana sebesar 97,91%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 2** terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan SOP dengan indikator dokumen keuangan Perangkat Daerah sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp. 17.925.953.148,- atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp. 20.797.043.012,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 2 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 2 dokumen, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 86,19%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 3** terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan indikator terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah tercapai 85%, belum mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.78.764.606.,- atau 37,51% dari anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 17 orang atau 85% dari rencana sebesar 20 orang, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 85% lebih besar dari pada penggunaan dana sebesar 37,51%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 85% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 4** terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah dengan indikator terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah tercapai 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan

dana Rp. 3.114.438.679,- atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp. 3.288.707.449,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 9 orang atau 100% dari rencana sebanyak 9 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 94,70%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 5** terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan indikator jenis barang milik daerah terealisasi sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.9.500.000,- atau 95% dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 2 jenis atau 100% dari rencana sebanyak 2 jenis, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% dan capaian penggunaan dana sebesar 95%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belumdicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 6** tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran terealisasi 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi.Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 2.231.901.283,- atau 83,39% dari anggaran sebesar Rp.2.676.443.200,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 29 orang atau 100% dari rencana sebanyak 29 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 83,39%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 7** terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator barang milik daerah dalam kondisi baik tercapai 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan

dana Rp 3.288.084.507,- atau 92,57% dari anggaran sebesar Rp.3.552.112.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 6 Jenis atau 100% dari rencana sebanyak 6 Jenis, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 92,57%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 8** tersedianya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan indikator administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tercapai 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.1.517.483.659,- atau 87,14% dari anggaran sebesar Rp.1.741.413.794,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 87,14%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 9** tersedianya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan indikator kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terealisasi sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 1.655.093.940,- atau 92,06% dari anggaran sebesar Rp.1.797.793.200,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 11 paket atau 100% dari rencana sebanyak 11 paket , serta OH sebanyak 2 orang atau100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 92,06%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 10** tersedianya dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan dengan indikator dokumen penataan organisasi terealisasi sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 150.967.564,- atau 72,41% dari anggaran sebesar

Rp.208.482.400,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 7 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 7 dokumen, serta OH sebanyak 8 orang atau 100% dari rencana sebanyak 8 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% dan capaian penggunaan dana sebesar 72,41%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 11** terlaksananya keprotokoleran, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan sesuai dengan SOP dengan indikator laporan kegiatan keprotokoleran, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan terealisasi sebesar 100%, telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 1.478.050.989,- atau 94,05% dari anggaran sebesar Rp.1.571.621.982,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 12 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 12 laporan, serta OH sebanyak 17 orang atau 100% dari rencana sebanyak 17 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 94,05%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Analisis penggunaan sumber daya dan anggaran
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa capaian kinerja program telah menunjukkan efisiensi baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari anggaran dengan target capaian kinerja program sebesar 100% terealisasi sebesar 101,11%. Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh dari 3 (tiga) bagian dan telah mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bagian-bagian sehingga dapat mencapai kinerja yang ditargetkan dan telah merealisasikan output kegiatan sesuai target. Sedangkan capaian anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 35.896.688.437,- terealisasi sebesar Rp.31.492.407.675,- atau 87,73%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.404.280.762,- atau 12,27% yang berasal dari diantaranya:

- Terdapat efisiensi belanja kontribusi diklat sebesar 62,5% dikarenakan beberapa diklat yang diikuti tidak dipungut biaya kontribusi dan sebagian biaya kontribusi rendah, adanya penundaan kegiatan yang telah dijadwalkan, beberapa ASN yang tidak jadi mengikuti diklat dan adanya diklat online yang diikuti pegawai yang tidak berbayar.

- Dalam penyediaan barang cetakan dan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari masing-masing bagian sehingga mengurangi biaya sampai dengan 62,30%
- Pelaksanaan Medical check up bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang semula akan dipergunakan bagi 8 orang, namun pelaksanaannya hanya dipergunakan untuk 5 orang sehingga mengurangi biaya sampai 57,70%
- Belanja makanan dan minuman pada masing-masing kegiatan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan adanya rapat yang dilaksanakan secara online ataupun diundang oleh Perangkat Daerah.
- Laporan atau dokumen disimpan atau diarsipkan dalam bentuk softfile dan dikirim melalui aplikasi sehingga terdapat efisiensi belanja kertas dan cover.
- Terdapat satu kegiatan yaitu pada tahun 2025 belum dapat dilakukan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung karena menunggu rilis resmi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN 2025-2045) oleh Kementerian PANRB dan dijadwalkan kembali dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga mengurangi anggaran sebesar 70,51%.

B. Kinerja Lainnya 2025

1. Penghargaan/Apresiasi Lainnya

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mendapatkan 4 (empat) penghargaan sebagai berikut:

1. Hasil Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 99,4 dengan kategori AA (Istimewa).

2. Capaian pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 dengan nilai 96 dan mendapatkan peringkat pertama di tingkat Kanwil HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 88,67 dengan kategori Sangat Baik.

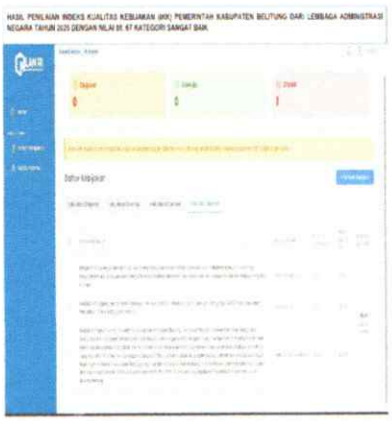

4. Kategori Dwitungga dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2025 dengan nilai 84.

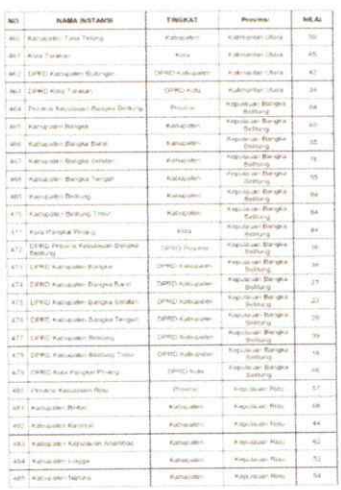

2. Perbaikan SAKIP pada tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Nomor 700.1.2.1/108/RIKin/INSPEK/2025 tanggal 19 Agustus 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung memperolah nilai 66,30 kategori nilai "B". Beberapa rekomendasi dalam peningkatan kinerja yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran strategis agar relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
2. Mencantumkan target sasaran startegis per triwulan pada dokumen Rencana Aksi untuk mempermudah proses evaluasi agar target lebih terukur dan mudah dicapai
3. Melakukan pengukuran kinerja sasaran strategis periodik (per triwulan) dengan menyajikan analisa capaian kinerja dengan menjelaskan lebih rinci mengenai faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja yang relevan atas kinerja sasaran strategsi.
4. Pimpinan ikut terlibat secara langsung dalam pemantauan pencapaian kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja dengan penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian anggaran berdasarkan faktor-faktor hambatan yang diuraikan pada laporan Capaian Kinerja
5. Menyajikan informasi yang jelas dan lengkap tentang analisa capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang berhubungan langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Strategis sudah relevan dengan tugas poko dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029
2. Pencatuman target sasaran strategis per triwulan sudah ditindaklanjuti dalam dokumen perubahan rencana aksi Tahun 2025 dan laporan capaian kinerja perubahan Setda tahun 2025
3. Laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten telah dikur secara periodik (per triwulan) dan telah di upload pada website *https://esr.menpan.go.id/* sehingga dapat dilihat perkembangan/kemajuan pencapaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan, sehingga perjanjian kinerja induk mengacu kepada rencana strategis 2024-2025, sedangkan pada perubahan perjanjian kinerja mengacu pada rencana strategis 2025-2029. Pada rencana strategis 2025-2029 telah disusun tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanaan administratif. Sehingga dalam laporan capaian kinerja triwulan IV telah menyajian data capain kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang berpedoman pada rencana strategis 2025-2029.

4. Pimpinan telah ikut terlibat secara langsung dalam pemantauan pencapaian kinerja dan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melalui rapat terkait laporan capaian kinerja per triwulan.
5. Pada tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, sehingga pada tahun ini Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menyusun laporan capaian kinerja triwulan I sampai dengan triwulan III berpedoman pada perjanjian kinerja induk yang mengacu pada rencana strategis 2024-2026. Sedangkan laporan capaian kinerja triwulan IV berdasarkan pada perubahan perjanjian kinerja yang mengacu pada rencana strategis 2025-2025. Terdapat perbedaan pada tujuan, sasaran maupun indikator kinerja pada 2 (dua) periode perencaan. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Belitung telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan penyusunan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan menjabarkannya dalam program/kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Kabupaten Belitung, dan dilaporkan dalam laporan capaian kinerja triwulan IV dan pada Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar 89,61% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.472.025.562 terealisasi sebesar Rp. 48.472.025.562,-. Dibandingkan dengan tahun 2024 meningkat sebesar 0,37% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.111.388.314,- terealisasi sebesar Rp. 56.323.529.048,- atau 89,24%. Adapun rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**169.100.000**	**207.448.000**	**122,68**	**179.204.000**
Retribusi Daerah	169.100.000	191.234.000	122,68	179.204.000
Lain-lain PAD yang Sah	0	16.214.000	113,09	0
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**169.100.000**	**207.448.000**	0,00	**179.204.000**
JUMLAH PENDAPATAN	**169.100.000**	**207.448.000**		**179.204.000**
BELANJA DAERAH	**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**	**56.323.529.048**
BELANJA OPERASI	**48.230.117.942**	**43.402.785.762**	**89,58**	**52.847.149.048**
Belanja Pegawai	22.300.712.176	19.270.684.644	86,41	20.464.145.886
Belanja Barang dan Jasa	19.014.405.766	17.096.984.389	89,92	21.300.214.813
Belanja Hibah	6.915.000.000	6.837.115.729	98,87	11.082.788.349
JUMLAH BELANJA OPERASI	**48.230.117.942**	**43.402.785.762**	**89,58**	**52.847.149.048**
BELANJA MODAL	**241.907.620**	**232.657.100**	**96,18**	**3.476.380.000**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.917.620	223.222.100	96,25	3.476.380.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.990.000	9.435.000	94,44	0
JUMLAH BELANJA MODAL	**241.907.620**	**232.657.100**	**96,18**	**3.476.380.000**
JUMLAH BELANJA	**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**	**56.323.529.048**
SURPLUS/DEFISIT	**(48.302.925.562)**	**(43.229.994.862)**	**89,50**	**(56.144.325.048)**

Rincian per jenis belanja dan per program Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.35 dan tabel 3.36 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	48.230.117.942	43.204.785.762	89,58
2	Belanja Modal	241.907.620	232.657.100	96,18
Jumlah		48.472.025.562	43.437.442.862	89,61

Gambar 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar Rp48.472.025.562,- yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp. 48.230.117.942,- dan belanja modal sebesar Rp.241.907.620,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.437.442.862,- atau tercapai sebesar 89,61%.

Tabel 3.36
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Program/Kegiatan

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**			
1	Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.322.800	21.335.881	91,48
Jumlah Program I		**23.322.800**	**21.335.881**	**91,48**
II	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			
1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	626.698.600	538.056.014	85,86
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.731.888.350	10/470.408.748	97,56
3	Kegiatan Fasilitasi Dan koordinasi Hukum	381.257.300	353.024.744	92,59
4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	16.653.300	14.880.130	89,35
Jumlah Program II		**11.756.497.550**	**11.376.369.636**	**96,77**
III	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**			
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	211.893.100	136.552.513	64,44

2. Perbaikan SAKIP pada tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Nomor 700.1.2.1/108/RIKin/INSPEK/2025 tanggal 19 Agustus 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung memperolah nilai 66,30 kategori nilai "B". Beberapa rekomendasi dalam peningkatan kinerja yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran strategis agar relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
2. Mencantumkan target sasaran startegis per triwulan pada dokumen Rencana Aksi untuk mempermudah proses evaluasi agar target lebih terukur dan mudah dicapai
3. Melakukan pengukuran kinerja sasaran strategis periodik (per triwulan) dengan menyajikan analisa capaian kinerja dengan menjelaskan lebih rinci mengenai faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja yang relevan atas kinerja sasaran strategsi.
4. Pimpinan ikut terlibat secara langsung dalam pemantauan pencapaian kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja dengan penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian anggaran berdasarkan faktor-faktor hambatan yang diuraikan pada laporan Capaian Kinerja
5. Menyajikan informasi yang jelas dan lengkap tentang analisa capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang berhubungan langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Strategis sudah relevan dengan tugas poko dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029
2. Pencatuman target sasaran strategis per triwulan sudah ditindaklanjuti dalam dokumen perubahan rencana aksi Tahun 2025 dan laporan capaian kinerja perubahan Setda tahun 2025
3. Laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten telah dikur secara periodik (per triwulan) dan telah di upload pada website *https://esr.menpan.go.id/* sehingga dapat dilihat perkembangan/kemajuan pencapaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan, sehingga perjanjian kinerja induk mengacu kepada rencana strategis 2024-2025, sedangkan pada perubahan perjanjian kinerja mengacu pada rencana strategis 2025-2029. Pada rencana strategis 2025-2029 telah disusun tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanaan administratif. Sehingga dalam laporan capaian kinerja triwulan IV telah menyajian data capain kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang berpedoman pada rencana strategis 2025-2029.

4. Pimpinan telah ikut terlibat secara langsung dalam pemantauan pencapaian kinerja dan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melalui rapat terkait laporan capaian kinerja per triwulan.
5. Pada tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, sehingga pada tahun ini Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menyusun laporan capaian kinerja triwulan I sampai dengan triwulan III berpedoman pada perjanjian kinerja induk yang mengacu pada rencana strategis 2024-2026. Sedangkan laporan capaian kinerja triwulan IV berdasarkan pada perubahan perjanjian kinerja yang mengacu pada rencana strategis 2025-2025. Terdapat perbedaan pada tujuan, sasaran maupun indikator kinerja pada 2 (dua) periode perencaan. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Belitung telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan penyusunan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan menjabarkannya dalam program/kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Kabupaten Belitung, dan dilaporkan dalam laporan capaian kinerja triwulan IV dan pada Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar 89,61% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.472.025.562 terealisasi sebesar Rp. 48.472.025.562,-. Dibandingkan dengan tahun 2024 meningkat sebesar 0,37% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.111.388.314,- terealisasi sebesar Rp. 56.323.529.048,- atau 89,24%. Adapun rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**169.100.000**	**207.448.000**	**122,68**	**179.204.000**
Retribusi Daerah	169.100.000	191.234.000	122,68	179.204.000
Lain-lain PAD yang Sah	0	16.214.000	113,09	0
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**169.100.000**	**207.448.000**	0,00	**179.204.000**
JUMLAH PENDAPATAN	**169.100.000**	**207.448.000**		**179.204.000**
BELANJA DAERAH	**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**	**56.323.529.048**
BELANJA OPERASI	**48.230.117.942**	**43.402.785.762**	**89,58**	**52.847.149.048**
Belanja Pegawai	22.300.712.176	19.270.684.644	86,41	20.464.145.886
Belanja Barang dan Jasa	19.014.405.766	17.096.984.389	89,92	21.300.214.813
Belanja Hibah	6.915.000.000	6.837.115.729	98,87	11.082.788.349
JUMLAH BELANJA OPERASI	**48.230.117.942**	**43.402.785.762**	**89,58**	**52.847.149.048**
BELANJA MODAL	**241.907.620**	**232.657.100**	**96,18**	**3.476.380.000**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.917.620	223.222.100	96,25	3.476.380.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.990.000	9.435.000	94,44	0
JUMLAH BELANJA MODAL	**241.907.620**	**232.657.100**	**96,18**	**3.476.380.000**
JUMLAH BELANJA	**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**	**56.323.529.048**
SURPLUS/DEFISIT	**(48.302.925.562)**	**(43.229.994.862)**	**89,50**	**(56.144.325.048)**

Rincian per jenis belanja dan per program Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.35 dan tabel 3.36 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	48.230.117.942	43.204.785.762	89,58
2	Belanja Modal	241.907.620	232.657.100	96,18
Jumlah		48.472.025.562	43.437.442.862	89,61

Gambar 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar Rp48.472.025.562,- yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp. 48.230.117.942,- dan belanja modal sebesar Rp.241.907.620,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.437.442.862,- atau tercapai sebesar 89,61%.

Tabel 3.36
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Program/Kegiatan

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**			
1	Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.322.800	21.335.881	91,48
Jumlah Program I		**23.322.800**	**21.335.881**	**91,48**
II	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			
1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	626.698.600	538.056.014	85,86
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.731.888.350	10/470.408.748	97,56
3	Kegiatan Fasilitasi Dan koordinasi Hukum	381.257.300	353.024.744	92,59
4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	16.653.300	14.880.130	89,35
Jumlah Program II		**11.756.497.550**	**11.376.369.636**	**96,77**
III	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**			
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	211.893.100	136.552.513	64,44

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	98.344.800	84.286.124	85,70
3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	460.098.475	312.641.233	67,95
4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	25.180.400	13.849.800	55,00
Jumlah Program III		**795.516.775**	**547.329.570**	**68,80**
IV	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.071.400	42.169.300	97,91
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.797.043.012	17.925.953.148	86,19
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.000.000	78.764.606	37,51
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.288.707.449	3.114.438.679	94,70
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	9.500.000	95,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.676.443.200	2.231.901.283	83,39
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.552.112.000	3.288.084.507	92,57
8	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1.741.413.794	1.517.483.659	87,14
9	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.797.793.200	1.655.093.940	92,06
10	Kegiatan Penataan Organisasi	208.482.400	150.967.564	72,41
11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.571.621.982	1.478.050.989	94,05
Jumlah Program IV		**35.896.688.437**	**31.492.407.675**	**87,73**
Jumlah Total		**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025, dengan serapan anggaran tertinggi sebesar 96,77% pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan serapan pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 91,48%, program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 87,73%, dan program Perekonomian dan Pembangunan sebesar 68,80%.

Bab 4 PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk pertangungjawaban kinerja dan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja tujuan dan sasaran strategis. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan sehingga dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 disajikan pencapaian indikator kinerja yang berpedoman pada rencana strategis 2024-2026 dan rencana strategis 2025-2029.

Berdasarkan rencana strategis periode 2024-2025, capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan III meliputi persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target 90% tercapai 42,62%, persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dengan target 80%, realisasi sampai dengan triwulan III belum tersedia, karena hasil evaluasi dari Kementerian terkait akan dirilis pada tahun 2026, persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target 100% tercapai 102,20%, persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan target 100% tercapai 50% dan persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan target 100% tercapai 88,79%.

Realisasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang berpedoman pada rencana strategis tahun 2025-2029 yaitu status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target 2,65 (sedang) belum tersedia realisasinya dikarenakan menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, persentase kebijakan bidang bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi 87,83% (efektif) atau terealisasi 117,11%, persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi sebesar 98,68% (sangat efektif) atau 131,57%, dan persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif dengan terget 75 (efektif) terealisasi 98,09% (sangat efektif) atau 130,79%

Ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung secara umum didukung (1) adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah(2), penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*, (3) optimalisasi fasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah

garapan yang diadukan oleh masyarakat, (4) penguatan kerangka regulasi dan hukum dimana harus memastikan adanya Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama yang jelas, mengikat, dan tidak tumpeng tindih. Kerangka hukum yang kuat memberikan kepastian dan landasan yang sah bagi pelaksanaan kerjasama (5) transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap proses kerja sama dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, (6) terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan tim clearing hause yng dapat digunakan oleh non pelaku pengadaan untuk pengaduan/permasalahan pengadaan barang dan jasa (7) adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam Regulasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, (8), tersedianya aplikasi terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama (*e-pekasam*), aplikasi sistem informasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (*si pelempang*) untuk mempermudah layanan dan pelaksanaan kegiatan, aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat untuk kemudahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, serta monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah yang intensif dilaksanakan secara berkelanjutan, (9) asistensi/Pembinaan/Pendampingan baik kepada pelaku pengadaan (penyedia atau non penyedia) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (termasuk didalamnya penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa), (10) mengadakan kegiatan workshop/bimbingan teknis/sosialisasi/ataupun acara sejenis lainnya terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (11) 5 (lima) agenda besar dalam gerakan Reformasi Birokrasi yaitu percepatan reformasi birokrasi, island of integrity, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan, (12) koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain (1) kurangnya komitmen pimpinan daerah menjadikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai alat ukur kinerja yang strategis (2) tidak adanya Dinas terkait yang mengurus urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten Belitung selain di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, sehingga fungsi-fungsi krusial tersebut berisiko tidak berjalan optimal, (3) kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam merealisasikan rencana kerja sama, (4) koordinasi dengan perangkat Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah kurang optimal, (5) inventarisasi data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kurang optimal, (6) laporan pelaksanaan operasional dan Keuangan BUMD sering terlambat (7) masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum tepat waktu dalam melakukan input ke dalam aplikasi *si pelempang*, (8) beberapa indikator penilaian tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat (seperti indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ serta indikator kematangan UKBPJ), (9) beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang tepat dalam menentukan metode pemilihan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga antara perencanaan dengan pelaksanaan berbeda (mempengaruhi skor SiRUP yang didapat), (10) belum ditetapkannya Grand desain RB Nasional 2025-2045 dan Roadmap RB Nasional 2025-2029, (11) Perangkat Daerah belum memperbaharui standar pelayanan dan SOP, (12) sistem perencanaan, anggaran, pelaporan dan evaluasi belum terintergrasi, sehingga pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat optimal.

Selain itu, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung didukung melalui penghargaan yang diterima yaitu Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 dengan nilai 96 dan mendapatkan peringkat pertama di tingkat Kanwil HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kategori Dwitungga dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2025 dengan nilai 84, Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 88,67 dengan kategori Sangat Baik dan Hasil Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 99,4 dengan kategori AA (Istimewa).

B. Rencana Tindak Lanjut 2026

Berdasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan dengan melihat faktor pendorong serta kendala yang dihadapi maka perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya:

- Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah, Pemanfaatan pedoman evaluasi (EPPD) dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arahan kebijakan nasional dan prinsip otonomi daerah.
- Menjadikan capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.
- Penguatan koordinasi dan sinergi antar bagian dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pelayanan.
- Penyusunan payung hukum yang jelas, pastikan setiap kerja sama didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan yang rinci dan mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- Peningkatakan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja, melibatkan pimpinan tinggi dalam tahap awal perencanaan kerja sama,
- Optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Belitung dengan APH dan Forkopimda,
- Memaksimalkan koordinasi Forum TJSLP dengan Perusahaan/BUMN untuk secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan CSR/TJSLP,
- Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (terutama penggunaan katalog versi 6)
- Memaksimalkan layanan dan dukungan (helpdesk/trainer) LPSE untuk membantu perangkat daerah ataupun penyedia melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
TARGET REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**1.1**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**Persen**	**100**	**50,00**	**50,00**						
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	1.1.1.	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	2	1	50	24.858.800	12.455.381	50,10	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**50,00**	**24.858.800**	**12.455.381**	50,10	**1**	**1**	
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**2.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**75,00**	**75,00**						
		2.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**91,20**	**91,20**						
		2.3	**Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi**	**persen**	**100**	**90,47**	**90,47**						
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	4	57,14	783.051.794	473.582.197	60,48	4	4	100
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	0	0	10.783.611.700	8.303.082.594	77,00	8	8	100
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	711	806	113,36	500.052.882	196.445.229	39,28	11	11	100
2.4	Terlaksananya Kerjasama Daerah	2.4.1	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	1	50	17.681.900	7.982.500	45,15	2	2	100
Capaian Rata-Rata							**55,13**	**12.084.398.276**	**8.981.092.520**	**74,32**	**25**	**25**	
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**3.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**	**persen**	**85**	**76,92**	**90,494**						
		3.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**64,29**	**64,29**						
		3.3	**Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**91,00**	**91,00**						
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	7	63,64	122.915.992	60.422.332	49,16	3	3	100
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	9	64,29	512.984.000	56.052.524	10,93	6	6	100
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	0	0	486.709.275	197.810.010	40,64	21	21	100
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	3	60,00	42.880.313	8.610.500	20,08	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**46,98**	**1.165.489.580**	**322.895.366**	**27,70**	**31**	**31**	**100**

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**4.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**63,16**	**63,16**						
		4.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**71**	**0**	**0**						
		4.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**70**	**70**						
		4.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**33,33**	**33,33**						
		4.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**67,82**	**67,82**						
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	4.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	9	90	48.614.300	32.838.500	67,55	2	2	100
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	4.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	20.797.477.412	13.098.917.808	62,98	6	6	100
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	4.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	20	8	40	210.000.000	50.737.840	24,16	1	1	100
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	4.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	65	65,0	3.537.445.040	1.895.061.333	53,57	9	9	100
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	4.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	8	0	0	900.000.000	-	0,00	2	2	100
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	75	75,00	2.636.443.200	1.548.974.426	58,75	5	5	100
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	4	66,67	2.818.297.000	1.515.547.607	53,78	6	6	100
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	82	82,00	1.741.413.794	845.696.441	48,56	1	1	100
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat	4.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	5	45,45	1.451.551.200	794.015.290	54,70	2	2	100
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	4.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	1	14,29	243.024.600	84.913.164	34,94	8	8	100
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	4.11.1	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	9	75	1.955.419.526	901.905.589	46,12	15	15	100
	Capaian Rata-Rata						**59,40**	**36.339.686.072**	**20.768.607.998**	**57,15**	**57**	**57**	100
Total								**49.614.432.728**	**30.085.051.265**	**60,64**			

LAMPIRAN II

PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik /(turun)	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik (turun)	Target 2025	% Realisasi Terhadap Target 2025
1		*2*		*3*	*5*	*4*	*6*	*8*	*7*	*9*	*10*	*11*
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**1.1**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	Persen	50	100	Turun	50	100	Naik	100	50
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	1.1.1.	Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	1	1	Tetap	50	33	Naik	2	50,00
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**2.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**	**persen**	**75,00**	**100,00**	Turun	**75,00**	**100,00**	Turun	100	**75**
		2.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**persen**	**91,20**	**100,00**	Turun	**91,20**	**100,00**	Turun	100	**91,20**
		2.3	**Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi**	**persen**	**90,47**	**100,00**	Turun	**90,47**	**100,00**	Turun	100	**90,47**
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	4	6	turun	57,14	100,00	turun	7	57
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	0	5	turun	0	100	turun	5	0
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	806	712	Naik	113,36	100,56	Naik	711	113,36
2.4	Terlaksananya Kerjasama Daerah	2.4.1	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	1	2	turun	50	100	turun	2	50
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**3.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**	**persen**	**76,92**	**80**	Turun	**90,49**	**100,00**	Turun	85	**90,49**
		3.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**64,29**	**100**	Turun	**64,29**	**100**	Turun	100	**64,29**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik /(turun)	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik (turun)	Target 2025	% Realisasi Terhadap Target 2025
1		2		3	5	4	6	8	7	9	10	11
		3.3	**Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti**	**persen**	**91,00**	**100,00**	Turun	**91**	**100**	Turun	100	**91,00**
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	7	11	Turun	63,64	100,00	Turun	11	63,64
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	9	14	Turun	64,29	100,00	Turun	14	64,29
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	0	3	Turun	0	100	Turun	3	0,00
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	3	5	Turun	60	100	Turun	5	60,00
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**4.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**63,16**	**91,67**	**Turun**	**63,16**	**91,67**	**Turun**	**100**	**63,16**
		4.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**0,00**	**78,94**		**0,00**	**112,77**	**0**	**71**	**0,00**
		4.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**persen**	**70,00**	**100,00**	**Turun**	**70**	**100**	**Turun**	**100**	**70**
		4.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**33,33**	**100,00**	**Turun**	**33,33**	**100,00**	**Turun**	**100**	**33,33**
		4.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**67,82**	**100,00**	**Turun**	**67,82**	**100**	**Turun**	**100**	**67,82**
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	4.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	9	Turun	90,00	90,00	Turun	10	90
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	4.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	Turun	100	100	Turun	2	100
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	4.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	8	16	Turun	40,00	80,00	Turun	20	40
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	4.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	65	100	Turun	65,00	100,00	Turun	100	65
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	4.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	0	6	Turun	0,00	100,00	Turun	8	0
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	75	100	Turun	75,00	100,00	Turun	100	75

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik /(turun)	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik (turun)	Target 2025	% Realisasi Terhadap Target 2025
1		*2*		*3*	*5*	*4*	*6*	*8*	*7*	*9*	*10*	*11*
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	4	6	Turun	66,67	100,00	Turun	6	67
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	82	100	Turun	82,00	100,00	Turun	100	82
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	5	11	Turun	45,45	100,00	Turun	11	45
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	4.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	1	7	Turun	14,29	100,00	Turun	7	14
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	4.11.1	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	9	12	Turun	75,00	100,00	Turun	12	75

LAMPIRAN III

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			% Efisiensi	Nilai Efisien
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**100**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**Persen**	**100**	**50**	**50**					
		50,00	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	2	1	50,00	24.858.800	12.455.381	50,10	49,90	12.403.419
Jumlah SK-KP 1								50,00	**24.858.800**	**12.455.381**	**50,10**	**49,90**	**12.403.419**
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**85,56**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**		**persen**	**100**	**75,00**	**75,00**			74,32		
			Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**91,20**	**91,20**					
			Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi		**persen**	**100**	**90,47**	**90,47**					
		57,14	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	4	57,14	783.051.794	473.582.197	60,48	39,52	309.469.597
		0,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	0	0	10.783.611.700	8.303.082.594	77,00	23,00	2.480.529.106
		113,36	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	711	806	113,36	500.052.882	196.445.229	39,28	60,72	303.607.653
		50,00	Terlaksananya Kerjasama Daerah	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	1	50	17.681.900	7.982.500	45,15	54,85	9.699.400
Jumlah SK-KP 2								55,13	**12.084.398.276**	**8.981.092.520**	**74,32**	**25,68**	**3.103.305.756**
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**81,93**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**		**persen**	**85**	**76,92**	**90,49**					
			Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**64,29**	**64,29**					
			Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**91,00**	**91,00**					

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			% Efisiensi	Nilai Efisien
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	63,64	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	7	63,64	122.915.992	60.422.332	49,16	50,84	62.493.660
	64,29	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	9	64,29	512.984.000	56.052.524	10,93	89,07	456.931.476
	0,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	0	0,00	486.709.275	197.810.010	40,64	59,36	288.899.265
	60,00	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	3	60,00	42.880.313	8.610.500	20,08	79,92	34.269.813
Jumlah SK-KP 3							46,981	**1.165.489.580**	**322.895.366**	**27,70**	**72,30**	**842.594.214**
4 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	**46,86**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**100**	**63,16**	**63,16**					
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**71**	**0**	**0,00**					
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		**persen**	**100**	**70**	**70,00**					
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**100**	**33,33**	**33,33**					
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		**persen**	**100**	**67,82**	**67,82**					
	90,00	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	9	90	48.614.300	32.838.500	67,55	32,45	15.775.800
	100	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	20.797.477.412	13.098.917.808	62,98	37,02	7.698.559.604
	40,00	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	20	8	40	210.000.000	50.737.840	24,16	75,84	159.262.160
	65,00	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	65	65	3.537.445.040	1.895.061.333	53,57	46,43	1.642.383.707
	0,00	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	8	0	0	900.000.000	-	0,00	100,00	900.000.000
	75,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	75	75	2.636.443.200	1.548.974.426	58,75	41,25	1.087.468.774
	66,67	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	4	66,67	2.818.297.000	1.515.547.607	53,78	46,22	1.302.749.393
	82,00	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	82	82	1.741.413.794	845.696.441	48,56	51,44	895.717.353
	45,45	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	5	45,45	1.451.551.200	794.015.290	54,70	45,30	657.535.910
	14,29	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	1	14,29	243.024.600	84.913.164	34,94	65,06	158.111.436

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			% Efisiensi	Nilai Efisien
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		
	75,00	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	9	75	1.955.419.526	901.905.589	46,12	53,88	1.053.513.937
Jumlah SK-KP 4								**36.339.686.072**	**20.768.607.998**	**57,15**	**42,85**	**15.571.078.074**
Total								**49.614.432.728**	**30.085.051.265**	**60,64**	**39,36**	**19.529.381.463**

LAMPIRAN IV
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUPUT KEGIATAN (IOK)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ turun	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik/ turun
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**persen**	**50**	**100**	**Turun**	**50**	**100**	**Naik**
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	a	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	1	1	Tetap	50	33,33	Naik
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**		**persen**	**39**	**100**	**Turun**	**39**	**100**	**Turun**
		Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		**persen**	**91**	**100**	**Turun**	**91**	**100**	**Turun**
		Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi		**persen**	**90**	**100**	**Turun**	**90**	**100**	**Turun**
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	a	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	4	6	turun	57,14286	100	turun
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	b	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	0	5	turun	0	100	turun
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	c	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	persen	806	712	Naik	113,36	100,56	Naik
2.4	Terlaksananya Kerjasama Daerah	d	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	1	2	turun	50	100	**turun**
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**		**persen**	**76,92**	**80**	**Turun**	**90,49412**	**100**	**Turun**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ turun	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik/ turun
		Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti		**persen**	**64,29**	**100**	**Turun**	**64,29**	**100**	**Turun**
		Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti		**persen**	**91**	**100**	**Turun**	**91**	**100**	**Turun**
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	a	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	7	11	Turun	63,63636	100	Turun
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	b	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	9	14	Turun	64,28571	100	Turun
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	c	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	0	3	Turun	0	100	Turun
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	d	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	3	5	Turun	60	100	Turun
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**63,16**	**91,67**	**Turun**	**63,16**	**91,67**	**Turun**
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**0**	**78,94**		**0,00**	**112,77**	**0**
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		**persen**	**70**	**100**	**Turun**	**70**	**100**	**Turun**
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**37,5**	**100**	**Turun**	**37,5**	**100**	**Turun**
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		**persen**	**52,33**	**100**	**Turun**	**52,33**	**100**	**Turun**
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	a	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	9	Turun	90	90	Turun
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	b	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	Turun	100	100	Turun
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan	c	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	8	16	Turun	40	80	Turun

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ turun	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik/ turun
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	d	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	65	100	Turun	65	100	Turun
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	e	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	0	6	Turun	0	100	Turun
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	f	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	75	100	Turun	75	100	Turun
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	g	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	3	6	Turun	50	100	Turun
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	h	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	82	100	Turun	82	100	Turun
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	i	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	0	11	Turun	0	100	Turun
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	j	Dokumen penataan organisasi	dokumen	1	7	Turun	14,28571	100	Turun
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	k	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	9	12	Turun	75	100	Turun

LAMPIRAN V
TARGET REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**1.1**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**Persen**	**100**	**50,00**	**50**						
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	1.1.1.	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	2	1	50	23.322.800	21.335.881	91,48	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**50**	**23.322.800**	**21.335.881**	91,48	**1**	**1**	
2	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**2.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		2.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		2.3	**Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	7	100,00	626.698.600	538.056.014	85,86	4	4	100
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	5	100	10.731.888.350	10.470.408.748	97,56	8	8	100
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	708	1043	147,32	381.257.300	353.024.744	92,59	11	11	100
2.4	Teraksananya Kerjasama Daerah	2.4.1	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	2	100	16.653.300	14.880.130	89,35	2	2	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**111,83**	**11.756.497.550**	**11.376.369.636**	**96,77**	**25**	**25**	
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**3.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**	**persen**	**85**	**85**	**100**						
		3.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		3.3	**Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	100	211.893.100	136.552.513	64,44	3	3	100
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	14	100	98.344.800	84.286.124	85,70	6	6	100
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	100	460.098.475	312.641.233	67,95	24	24	100
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	5	100	25.180.400	13.849.800	55,00	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**100**	**795.516.775**	**547.329.670**	**68,80**	**34**	**34**	100
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**4.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		4.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**71**	**74,95**	**105,56**						
		4.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100**						

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		4.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	4.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	100	43.071.400	42.169.300	97,91	2	2	100
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	4.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	20.797.043.012	17.925.953.148	86,19	6	6	100
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	4.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	20	17	85	210.000.000	78.764.606	37,51	1	1	100
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	4.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	3.288.707.449	3.114.438.679	94,70	9	9	100
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan	4.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	2	2	100	10.000.000	9.500.000	95,00	2	2	100
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	100	100	2.676.443.200	2.231.901.283	83,39	29	29	100
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	6	100	3.552.112.000	3.288.084.507	92,57	6	6	100
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	100	1.741.413.794	1.517.483.659	87,14	1	1	100
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat	4.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	100	1.797.793.200	1.655.093.940	92,06	2	2	100
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	4.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	100	208.482.400	150.967.564	72,41	8	8	100
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	4.11.1	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	12	100	1.571.621.982	1.478.050.989	94,05	17	17	100
	Capaian Rata-Rata						**99**	**35.896.688.437**	**31.492.407.675**	**87,73**	**83**	**83**	100
	Total							**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**			

LAMPIRAN VI

PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATANTAHUN 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik /(turun)	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik (turun)	Target 2025	% Realisasi Terhadap Target 2025
1		*2*		*3*	*5*	*4*	*6*	*8*	*7*	*9*	*10*	*11*
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**1.1**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	Persen	50	100	Turun	50	100	Naik	100	50
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	1.1.1.	Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	1	1	Tetap	50,00	33,33	Naik	2	50,00
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**2.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100,00**	**100,00**	Tetap	**100**	100	Tetap	100	**100**
		2.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100,00**	**100,00**	Tetap	**100**	100	Tetap	100	**100**
		2.3	**Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi**	**persen**	**100,00**	**100,00**	Tetap	**100**	100	Tetap	100	**100**
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	6	Naik	100	100	Tetap	7	100
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	5	Tetap	100	100	Tetap	5	100
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	1043	712	Naik	147,32	100,56497	Naik	708	147,32
2.4	Terlaksananya Kerjasama Daerah	2.4.1	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	2	Tetap	100	100	Tetap	2	100
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**3.1**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**	**persen**	**85**	**80**	**Naik**	**100**	**100**	**Tetap**	85	**100**
		3.2	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	100	**100**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik /(turun)	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik (turun)	Target 2025	% Realisasi Terhadap Target 2025
1		2		3	5	4	6	8	7	9	10	11
		3.3	**Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	100	**100**
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	Tetap	100	100	Tetap	11	100
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	14	Tetap	100	100	Tetap	14	100
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap	3	100
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	5	Tetap	100	100	Tetap	5	100
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**4.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**92**	**Naik**	**100**	**91,67**	**Naik**	**100**	**100,00**
		4.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**74,95**	**78,94**	**Turun**	**105,56**	**112,77143**	**Turun**	**71**	**105,56**
		4.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**
		4.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**
		4.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	4.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	9	Naik	100	90	Naik	10	100
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	4.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	Tetap	100	100	Tetap	2	100
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	4.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	17	16	Naik	85	80	Naik	20	85
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	4.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	4.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	2	6	Turun	100	100	Tetap	2	100
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik /(turun)	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik (turun)	Target 2025	% Realisasi Terhadap Target 2025
1		*2*		*3*	*5*	*4*	*6*	*8*	*7*	*9*	*10*	*11*
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	6	Tetap	100	100	Tetap	6	100
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	Tetap	100	100	Tetap	11	100
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	4.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	Tetap	100	100	Tetap	7	100
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	4.11.1	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	12	Tetap	100	100	Tetap	12	100

LAMPIRAN VII

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			% Efisiensi	Nilai Efisien
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		
1 **Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**50**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**Persen**	**100**	**50**	**50**					
	50,00	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	2	1	**50**	23.322.800	21.335.881	91,48	8,52	1.986.919
Jumlah SK-KP 1							50,00	**23.322.800**	**21.335.881**	91,48	**8,52**	**1.986.919**
2 **Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**100**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**		**persen**	**100**	**100**	**100**					
		Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**100**	**100**					
		Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi		**persen**	**100**	**100**	**100**					
	100	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	7	100	626.698.600	538.056.014	85,86	14,14	88.642.586
	100	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	5	100	10.731.888.350	10.470.408.748	97,56	2,44	261.479.602
	146,69	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	711	1043	146,69	381.257.300	353.024.744	92,59	7,41	28.232.556
	100	Terlaksananya Kerjasama Daerah	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	2	100	16.653.300	14.880.130	89,35	10,65	1.773.170
Jumlah SK-KP 2							111,67	**11.756.497.550**	**11.376.369.636**	**96,77**	**3,23**	**380.127.914**
3 **Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**100**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**		**persen**	**85**	**85**	**100**					
		Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**100**	**100**					
		Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**100**	**100**					

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			% Efisiensi	Nilai Efisien
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	100	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	100	211.893.100	136.552.513	64,44	35,56	75.340.587
	100	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	14	100	98.344.800	84.286.124	85,70	14,30	14.058.676
	100	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	100	460.098.475	312.641.233	67,95	32,05	147.457.242
	100	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	5	100	25.180.400	13.849.800	55,00	45,00	11.330.600
Jumlah SK-KP 3							100	**795.516.775**	**547.329.670**	**68,80**	**31,20**	**248.187.105**
4 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	**101,11**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**100**	**100**	**100**					
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**71**	**74,95**	**105,56**					
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		**persen**	**100**	**100**	**100**					
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**100**	**100**	**100**					
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		**persen**	**100**	**100**	**100**					
	100	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	100	43.071.400	42.169.300	97,91	2,09	902.100
	100	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	20.797.043.012	17.925.953.148	86,19	13,81	2.871.089.864
	85	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	20	17	85	210.000.000	78.764.606	37,51	62,49	131.235.394
	100	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	3.288.707.449	3.114.438.679	94,70	5,30	174.268.770
	100	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	2	2	100	10.000.000	9.500.000	95,00	5,00	500.000
	100	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	100	100	2.676.443.200	2.231.901.283	83,39	16,61	444.541.917
	100	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	6	100	3.552.112.000	3.288.084.507	92,57	7,43	264.027.493
	100	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	100	1.741.413.794	1.517.483.659	87,14	12,86	223.930.135
	100	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	100	1.797.793.200	1.655.093.940	92,06	7,94	142.699.260
	100	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	100	208.482.400	150.967.564	72,41	27,59	57.514.836

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			% Efisiensi	Nilai Efisien
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		
	100	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	12	100	1.571.621.982	1.478.050.989	94,05	5,95	93.570.993
Jumlah SK-KP 4							**98,64**	**35.896.688.437**	**31.492.407.675**	**87,73**	**12,27**	**4.404.280.762**
Total								**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**	**10,39**	**5.034.582.700**

LAMPIRAN VIII
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUPUT KEGIATAN (IOK)

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ turun	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik/ turun
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*7*	*9*
1	**Terwujudnya proses Penyelesaian Sengketa Tanah**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**persen**	**50**	**100**	**Turun**	50	100	Naik
1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	a	Dokumen Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	1	1	Tetap	50	33,33	Turun
2	**Meningkatnya kualtas penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, Kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti**		**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Tetap**
		Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan kesejahteraan sosal dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Tetap**
		Persentase kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi		**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Tetap**
2.1	Penyelenggaraan penataan adminstrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	a	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	6	Naik	100	100	Tetap
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	b	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	5	5	Tetap	100	100	Tetap
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	c	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	dokumen	1043	712	Naik	147,32	100,56	Naik
2.4	Terlaksananya Kerjasama Daerah	d	Dokumen Kerja sama Daerah	dokumen	2	2	100	100,0	100,0	Tetap
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan Sumber daya alam yang ditindakanjuti**		**persen**	**85**	**80**	**Naik**	**100**	**100**	**Tetap**
		Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ turun	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik/ turun
		Persentase rekomendasi kebjiakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pengelolaan layanan pengadaan secara		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	a	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	Tetap	100	100	Tetap
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	b	Dokumen Administrasi Pembangunan	dokumen	14	14	Tetap	100	100	Tetap
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	c	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	d	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	5	5	Tetap	100	100	Tetap
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**100,00**	**91,67**	**Naik**	**100,00**	**91,67**	**Naik**
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**74,95**	**78,94**	**Turun**	**105,56**	**112,77**	**Turun**
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	a	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	9	Naik	100	90	Naik
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	b	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	Tetap	100	100	Tetap
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan	c	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	17	16	Naik	85	80	Naik
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	d	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	e	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	2	6	Turun	100	100	Tetap
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	f	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	100	Tetap	100	100	Tetap
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	g	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	6	6	Tetap	100	100	Tetap

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ turun	Capaian 2025	Capaian 2024	Naik/ turun
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	h	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	i	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	Tetap	100	100	Tetap
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	j	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	Tetap	100	100	Tetap
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	k	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	laporan	12	12	Tetap	100	100	Tetap

LAMPIRAN IX
JUMLAH PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah PP yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah PP	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN X
JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah KP yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah KP	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN XI
JUMLAH PROYEK PRIORITAS STRATEGIS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah PPS yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah PPS	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN XII
JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah PSN yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah PSN	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN XIII

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**24.858.800**	**23.322.800**	**21.335.881**	**91,48**	**100%**	**1.986.919**	**8,52**
	1.1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam		24.858.800	23.322.800	21.335.881	91,48	100%	1.986.919	8,52
		1.1.1	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.858.800	23.322.800	21.335.881	91,48	100%	1.986.919	8,52
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**12.084.398.276**	**11.756.497.550**	**11.376.369.636**	**96,77**	**100%**	**380.127.914**	**3,23**
	2.1	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan		783.051.794	626.698.600	538.056.014	85,86	100%	88.642.586	14,14
		2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	556.077.594	481.431.500	396.066.769	82,27	100%	85.364.731	17,73
		2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Adminitrasi Kewilayahan	62.741.300	35.899.200	34.660.090	96,55	100%	1.239.110	3,45
		2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	164.232.900	109.367.900	107.329.155	98,14	100%	2.038.745	1,86
	2.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		10.783.611.700	10.731.888.350	10.470.408.748	97,56	100%	261.479.602	2,44
		2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.600.950.800	4.621.330.600	4.420.449.633	95,65	100%	200.880.967	4,35
		2.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.643.885.800	4.576.009.050	4.516.047.779	98,69	100%	59.961.271	1,31
		2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.538.775.100	1.534.548.700	1.533.911.336	99,96	100%	637.364	0,04
	2.3	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum		500.052.882	381.257.300	353.024.744	92,59	100%	28.232.556	7,41
		2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	82.330.750	74.157.300	73.705.855	99,39	100%	451.445	0,61
		2.3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	293.227.717	267.163.100	240.454.159	90,00	100%	26.708.941	10,00
		2.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	124.494.415	39.936.900	38.864.730	97,32	100%	1.072.170	2,68
	2.4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		17.681.900	16.653.300	14.880.130	89,35	100%	1.773.170	10,65
		2.4.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	17.681.900	16.653.300	14.880.130	89,35	100%	1.773.170	10,65
3	**PROGRAM : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.165.489.580**	**795.516.775**	**547.329.670**	**68,80**	**100%**	**248.187.105**	**31,20**
	3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		122.915.992	211.893.100	136.552.513	64,44	100%	75.340.587	35,56
		3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	87.267.050	185.081.400	117.201.813	63,32	100%	67.879.587	36,68
		3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	27.514.142	21.389.600	15.917.800	74,42	100%	5.471.800	25,58

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
		3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8.134.800	5.422.100	3.432.900		100%		
	3.2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		42.880.313	25.180.400	13.849.800	55,00	100%	11.330.600	45,00
		3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	22.664.527	11.659.900	5.849.500	50,17	100%	5.810.400	49,83
		3.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	20.215.786	13.520.500	8.000.300	59,17	100%	5.520.200	40,83
	3.3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		512.984.000	98.344.800	84.286.124	85,70	100%	14.058.676	14,30
		3.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6.000.000	6.000.000	4.558.500	75,98	100%		
		3.3.2	Sub Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	452.291.000	40.006.800	28.574.000	71,42	100%	11.432.800	28,58
		3.3.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54.693.000	52.338.000	51.153.624	97,74	100%	1.184.376	2,26
	3.4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa		486.709.275	460.098.475	312.641.233	67,95	100%	147.457.242	32,05
		3.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	144.520.300	136.250.300	113.191.425	83,08	100%	23.058.875	16,92
		3.4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	241.228.575	237.978.575	168.680.008	70,88	100%	69.298.567	29,12
		3.4.3	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan barang Dan Jasa	100.960.400	85.869.600	30.769.800	35,83	100%	55.099.800	64,17
4	**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**36.339.686.072**	**35.896.688.437**	**31.492.407.675**	**87,73**	**100%**	**4.404.280.762**	**12,27**
	4.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		48.614.300	43.071.400	42.169.300	97,91	100%	902.100	2,09
		4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.960.700	16.274.200	15.877.600	97,56	100%	396.600	2,44
		4.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.633.500	3.366.000	3.364.500	99,96	100%	1.500	0,04
		4.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.406.800	3.231.800	3.184.500	98,54	100%	47.300	1,46
		4.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.752.400	4.394.200	4.170.600	94,91	100%	223.600	5,09
		4.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.846.400	4.688.600	4.684.100	99,90	100%	4.500	0,10
		4.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.014.500	11.116.600	10.888.000	97,94	100%	228.600	2,06
	4.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		20.797.477.412	20.797.043.012	17.925.953.148	86,19	100%	2.871.089.864	13,81
		4.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	20.772.298.382	20.772.298.382	17.904.754.235	86,20	100%	2.867.544.147	13,80
		4.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.179.030	24.744.630	21.198.913	85,67	100%	3.545.717	14,33
	4.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		210.000.000	210.000.000	78.764.606	37,51	100%	131.235.394	62,49
		4.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	210.000.000	210.000.000	78.764.606	37,51	100%	131.235.394	62,49

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
	4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.537.445.040	3.288.707.449	3.114.438.679	94,70	100%	174.268.770	5,30
		4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	150.000.000	149.553.000	99,70	100%	447.000	0,30
		4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	286.219.191	251.657.600	216.453.350	86,01	100%	35.204.250	13,99
		4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	180.000.000	179.967.000	99,98	100%	33.000	0,02
		4.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.538.546.000	1.353.124.000	1.246.078.520	92,09	100%	107.045.480	7,91
		4.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	58.983.900	50.229.900	18.938.000	37,70	100%	31.291.900	62,30
		4.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.203.695.949	1.203.695.949	1.203.651.309	100,00	100%	44.640	0,00
		4.4.7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100.000.000	99.797.500	99,80	100%	202.500	0,20
	4.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		900.000.000	10.000.000	9.500.000	95,00	100%	500.000	5,00
		4.5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000.000	-	-	0,00	0%	-	0,00
		4.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	-	0,00	0%	-	0,00
		4.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	10.000.000	9.500.000	95,00	100%	500.000	5,00
		4.5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00	0%	-	0,00
	4.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		2.636.443.200	2.676.443.200	2.231.901.283	83,39	100%	444.541.917	16,61
		4.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	19.000.000	15.391.760	81,01	100%	3.608.240	18,99
		4.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.489.000.000	1.529.000.000	1.213.406.598	79,36	100%	315.593.402	20,64
		4.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.443.200	1.128.443.200	1.003.102.925	88,89	100%	125.340.275	11,11
	4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.818.297.000	3.552.112.000	3.288.084.507	92,57	100%	264.027.493	7,43
		4.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.670.000	49.670.000	38.426.300	77,36	100%	11.243.700	22,64
		4.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	710.423.000	744.159.000	674.218.125	90,60	100%	69.940.875	9,40
		4.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	70.000.000	70.000.000	65.760.000	93,94	100%	4.240.000	6,06
		4.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	600.000.000	600.000.000	597.692.000	99,62	100%	2.308.000	0,38

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
		4.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.388.204.000	2.088.283.000	1.911.988.082	91,56	100%	176.294.918	8,44
	4.8	Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		1.741.413.794	1.741.413.794	1.517.483.659	87,14	100%	223.930.135	12,86
		4.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	928.413.794	928.413.794	765.931.409	82,50	100%	162.482.385	17,50
		4.8.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	106.500.000	106.500.000	45.052.250	42,30	100%	61.447.750	57,70
		4.8.3	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100,00	100%	-	0,00
		4.8.4	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	106.500.000	106.500.000	106.500.000	100,00	100%	0	0,00
	4.9	Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		1.451.551.200	1.797.793.200	1.655.093.940	92,06	100%	142.699.260	7,94
		4.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	726.325.600	831.004.600	785.654.890	94,54	100%	45.349.710	5,46
		4.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	625.691.000	867.254.000	770.052.950				
		4.9.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	99.534.600	99.534.600	99.386.100	99,85	100%	148.500	0,15
	4.10	Kegiatan Penataan Organisasi		243.024.600	208.482.400	150.967.564	72,41	100%	57.514.836	27,59
		4.10.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	64.135.100	52.135.100	51.886.264	99,52	100%	248.836	0,48
		4.10.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	53.032.900	39.877.900	25.266.300	63,36	100%	14.611.600	36,64
		4.10.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	52.900.700	50.713.500	14.956.500	29,49	100%	35.757.000	70,51
		4.10.4	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	33.322.900	26.122.900	22.969.900	87,93	100%	3.153.000	12,07
		4.10.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	39.633.000	39.633.000	35.888.600	90,55	100%	3.744.400	9,45
	4.11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi pimpinan		1.955.419.526	1.571.621.982	1.478.050.989	94,05	100%	93.570.993	5,95
		4.11.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	776.006.000	512.156.000	481.918.681	94,10	100%	30.237.319	5,90
		4.11.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	598.427.982	493.927.982	484.089.718	98,01	100%	9.838.264	1,99
		4.11.3	Sub Kegiatan Pendokumentasi Tugas Pimpinan	580.985.544	565.538.000	512.042.590	90,54	100%	53.495.410	9,46
	TOTAL			**49.614.432.728**	**48.472.025.562**	**43.437.442.862**	**89,61**	**100%**	**5.034.582.700**	**10,39**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARZUKI, S.I.P

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : BUPATI BELITUNG

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 12 November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos

Pihak Kesatu,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

MARZUKI, S.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197104131995031001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI
			2025	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**	**Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**2,65 (Sedang)**	**-**	**-**
2	Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	75% (Efektif)	-	-
3	Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Efektif	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Efektif	75% (Efektif)	-	-
4	Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang Efektif	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang Efektif	75% (Efektif)	-	-

Program			Anggaran	Keterangan
A	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	: Rp.	23.322.800	P-APBD
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	: Rp.	35.896.688.437	P-APBD
C	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	: Rp.	11.756.497.550	P-APBD
D	Program Perekonomian dan Pembangunan	: Rp.	795.516.775	P-APBD
	Total Anggaran	**: Rp.**	**48.472.025.562**	

Tanjungpandan, 12 November 2025

BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

MARZUKI, S.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197104131995031001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARZUKI

Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : Pj. BUPATI BELITUNG

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 17 Maret 2025

Pihak Kedua, BUPATI BELITUNG,	Pihak Kesatu, Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos	MARZUKI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90%
2	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	80%
3	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
4	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian tujuan dan sasaran daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%
5	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%

	Program/Kegiatan		Anggaran	Ket.
A	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Rp**	**24.858.800,00**	**P-APBD**
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	24.858.800,00	P-APBD
B	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Rp**	**36.339.686.072,00**	**P-APBD**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp	48.614.300,00	P-APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	20.797.477.412,00	P-APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	210.000.000,00	P-APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.537.445.040,00	P-APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	900.000.000,00	P-APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.636.443.200,00	P-APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.818.297.000,00	P-APBD

8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.741.413.794,00	P-APBD
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.451.551.200,00	P-APBD
10	Penataan organisasi	Rp	243.024.600,00	P-APBD
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	1.955.419.526,00	P-APBD
C	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Rp**	**12.084.398.276,00**	**P-APBD**
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp	783.051.794,00	P-APBD
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp	10.783.611.700,00	P-APBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	500.052.882,00	P-APBD
4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp	17.681.900,00	P-APBD
D	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Rp**	**1.165.489.580,00**	**P-APBD**
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	122.915.992,00	P-APBD
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	512.984.000,00	P-APBD
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	486.709.275,00	P-APBD
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	42.880.313,00	P-APBD
	Total Anggaran	**Rp**	**49.614.432.728,00**	

Tanjungpandan, 17 Maret 2025

BUPATI BELITUNG,

H.DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos

Pj.SEKRETARIS DAERAH KAB. BELITUNG,

MARZUKI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG